

**MANAJEMEN PEMBANGUNAN PEDESAAN
DI KECAMATAN SINJAI BARAT
KABUPATEN SINJAI**



UNIVERSITAS

Skripsi

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Negara
Universitas 45 Makassar**

Oleh :

A. Saiful Alam

4598021057

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR
2008**




HALAMAN PENERIMAAN


Pada hari ini, Kamis tanggal 9 bulan Januari tahun dua ribu tiga SKRIPSI dengan judul MANAJEMEN PEMBANGUNAN PEDESAAN DI KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI oleh :

N a m a : A. Saiful Alam
STB : 45 98 021 057
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

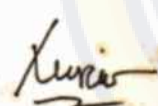
Telah diterima oleh panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Program Sarjana (S1)

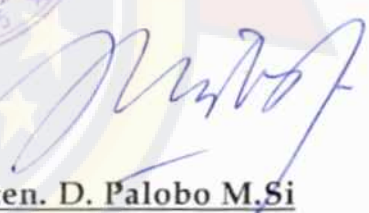
PENGAWAS UMUM


Ir. Darwis Panguriseng, M.Sc
Rektor Universitas "45" Makassar


Dra. Hj. Nurmi Nonci, M.Si
Dekan Fisipol "45" Makassar


PANITIA UJIAN


Dra. Hj. Nurmi Nonci, M.Si
Ketua

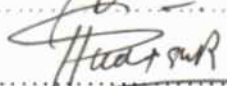

Drs. Marten. D. Palobo M.Si
Sekretaris

TIM PENGUJI

1. Dra. Hj. Nurmi Nonci, M.Si
2. Drs. Baharuddin, M.Si
3. Drs. Marten D Palobo, M.Si
4. Drs. M. Natsir Tompo


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

KATA PENGANTAR

Suatu kebanggaan tersendiri sekaligus menjadi sebuah pengalaman hidup, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang dan waktu yang cukup lama dalam menggeluti kehidupan kampus yang melelahkan, membosankan dan bahkan terkadang sangat menjengkelkan, adalah merupakan bahagian dari sisi kehidupan yang mempunyai makna dan hikmah tersendiri dalam menjalaninya.

Telah menjadi kesepakatan kita bersama bahwa, perguruan tinggi merupakan landasan ilmu pengetahuan, dimana dinamika kehidupan akademika yang ada didalamnya harus pula diakui sebagai salah satu faktor yang sangat berperan serta menentukan dalam pembentukan karakter dan integritas pada diri seorang mahasiswa yang sadar akan beban dan tanggung jawabnya dimasa depan, sehingga segala macam sisi pahit kehidupan kemahasiswaan dapat menjadi warna tersendiri yang luar biasa indah.

Penyusunan skripsi ini merupakan titik awal sebuah kesuksesan dari perjalanan kehidupan kampus yang telah banyak menguras pikiran, energi, pengorbanan materi dan rasa sehingga menjadi sebuah keharusan bagi penulis untuk memanjatkan **puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT**, Tuhan yang maha Rahman dan Maha Rahim atas karunia-Nya sehingga penulis dapat diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "MANAJEMEN PEMBANGUNAN PEDESAAN..DI KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI". Sebagai salah satu syarat akademik yang harus

dipenuhi dalam meraih gelar Sarjana Lengkap khususnya Jurusan Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas '45' Makassar.

Penulis sadar bahwa kemampuan intelektualitas yang penulis miliki sangatlah terbatas sehingga terakibat pada rangkaian dan susunan kata-katanya, juga teknik penulisannya menunjukkan ketidak sempurnaan, dan bahkan masih jauh dari sasaran yang hendak dicapai oleh suatu karya ilmiah. Olehnya itu tegur sapa dan keritikan dari semua pihak sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan karya tulis ini dan karya tulis selanjutnya.

Sekalipun penyusunan skripsi ini merupakan upaya penulis, namun sangatlah disadari aktifitas ini dalam batas tertentu bersifat parasit, dengan kata lain penulis tak mungkin dapt melakukannya tanpa bimbingan dari Bapak Drs. H. Baharuddin, MSi, sebagai konsultan I dan Bapak Drs. Marten D. Palobo, MSi, sebagai konsultan II. Yang selalu antusias merangsang daya keritis pemecahan banyak terima kasih.

Sebagai manusia biasa yang sadar akan keterbatasannya, serta untuk mengenang jasa-jasa serta budi baik para pihak yang telah membantu maka melalui kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Ir. Darwis Panguriseng, MSc, Rektor Universitas "45" Makassar, dan segenap civitas akademika Universitas "45" Makassar, kapan dan dimanapun penulis akan selalu merasa bangga sebagai anak kandung Almamater Universitas "45" Makassar

2. Ibu Dra. Hj. Nurmi Nonci, MSi, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas “45” Makassar dan segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas “45” Makassar yang selama ini dengan segala kerelaan hati telah menjadi orang tua yang baik.
3. Bapak Drs. Marten D. Palobo, MSi, sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas “45” Makassar
4. Bapak Drs. H. Andi Talha, kepala Kecamatan Sinjai Barat, beserta seluruh masyarakat Kecamatan Sinjai Barat atas segala bantuannya selama ini
5. Saudara-saudarku tercinta, yang selama ini selalu memberikan dorongan kepada penulis.
6. Adinda yang terkasih “FITRIANI” yang selama ini selalu setia mendampingi penulis.
7. Keluarga besar KEPMI-BONE KAJUARA dan keluarga besar Komisariat ARUNG PALAKKA Universitas “45” Makassar

Secara khusus saya ingin memberikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda dan Ibunda tercinta atas segala jerih payahnya selama ini, serta atas segala doa tulusnya yang tak pernah gersang dalam mengiringi perjalanan kuliah penulis. Semoga Allah SWT membalasnya dengan menyediakan surga bagi keduanya.

Akhirnya, semoga kiranya hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmatnya bagi kita semua, Amin.

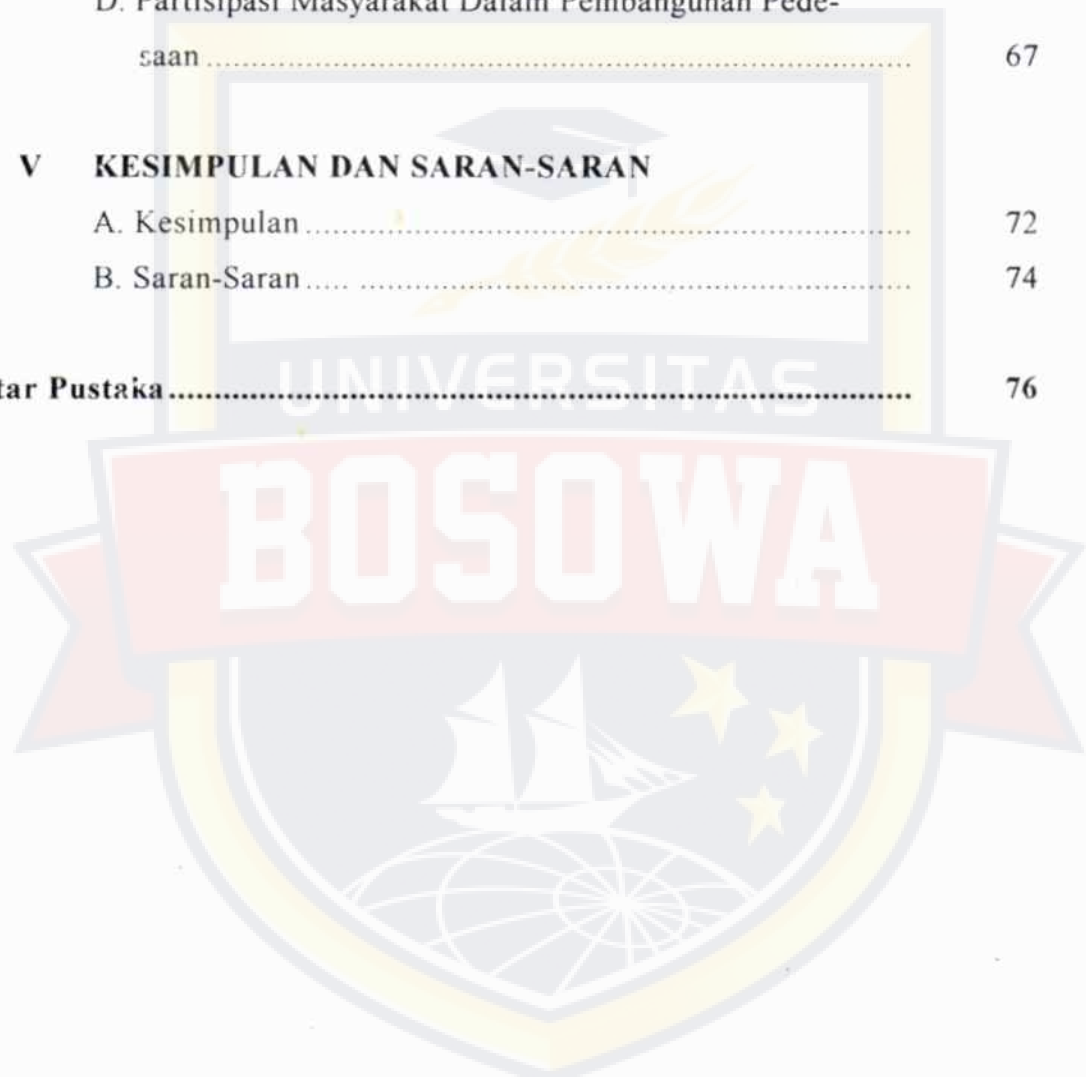
Makassar, 9 Januari 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Metodologi Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	11
E Sistematika Pembahasan.....	13
Bab II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Beberapa Pengertian.....	14
B. Perencanaan Pembangunan.....	18
C. Pelaksanaan Pembangunan	24
D. Pengawasan Pembangunan	31
E. Partisipasi Masyarakat.....	34
Bab III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Keadaan Geografi dan Demografis	38
B. Struktur Organisasi dan tata Kerja	41
C. Keadaan Pegawai.....	44

Bab IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Perencanaan Pembangunan Pedesaan.....	48
B.	Pelaksanaan Pembangunan Pedesaan	55
C.	Pengawasan Pembangunan Pedesaan	63
D.	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan	67
Bab V	KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	
A.	Kesimpulan	72
B.	Saran-Saran.....	74
Daftar Pustaka	76



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas Wilayah Kelurahan/Desa di Kecamatan Sinjai Barat Tahun 2001	39
Tabel 2	Banyaknya Penduduk Dirinci Perdesa/Kelurahan Tahun 2001 ..	40
Tabel 3	Jumlah dan Persentase Pegawai Kantor Kecamatan Sinjai Barat Menurut Jenis Kelamin	44
Tabel 4	Frekuensi dan Persentase Tingkat Pendidikan Formal Pegawai Kantor Kecamatan Sinjai Barat Tahun 2001	45
Tabel 5	Frekuensi dan Persentase Kepangkatan/Golongan Pegawai Kantor Kecamatan Sinjai Barat Tahun 2001	46
Tabel 6	Frekuensi Jabatan dan Eselon PNS Pada Kantor Kecamatan Sinjai Barat Tahun 2001	47
Tabel 7	Frekuensi dan Persentase Diklat Pegawai kantor Kecamatan Sinjai barat	47
Tabel 8	Aktor Dominan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa di Wilayah Kecamatan Sinjai Barat.....	54
Tabel 9	Pelaksanaan Pembangunan Pedesaan di Kecamatan Sinjai Barat	62
Tabel 10	Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Pedesaan di Wilayah Kecamatan Sinjai Barat	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka usaha mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di seluruh pelosok Nusantara. Sejalan dengan itu juga dipandang perlu adanya pengaturan hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dapat menjamin pelaksanaan otonomi daerah. Karena dalam kenyataannya pada setiap manajemen, semakin jauh pelaksanaan efektifitas dari pengawasan pimpinan pusat, semakin terbuka kemungkinan distorsi antara pelaksanaan dengan rencana. Distorsi bisa muncul karena semakin jauhnya kemampuan manajemen untuk melakukan kontrol dan ketidakmampuan pelaksanaan program di lapangan.

Sehubungan dengan itu, maka dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara telah dirumuskan upaya-upaya pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok nusantara yang aksentuasinya antara lain menegaskan, bahwa :

“Pembangunan masyarakat pedesaan perlu terus ditingkatkan terutama melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan. Sejalan dengan itu perlu ditingkatkan kemampuan masyarakat pedesaan untuk berproduksi serta mengolah

dan memasarkan hasil produksinya, sekaligus menciptakan lapangan kerja, dengan demikian masyarakat pedesaan makin mampu mengarahkan dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya segala dana dan daya bagi peningkatan pendapatan dan taraf hidupnya”.

Dengan aksentuasi tersebut, maka salah satu disiplin ilmiah yang dapat memberikan sumbangan nyata dalam peningkatan pembangunan pedesaan dalam rangka pembangunan nasional ialah manajemen pembangunan.

Dalam manajemen pembangunan di Indonesia, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur melalui beberapa macam peraturan dan perundang-undangan, yakni sebagai dasar tentang pelaksanaan adalah pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal itu antara lain disebutkan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian dalam kelanjutannya sudah banyak peraturan yang mengatur pelaksanaan manajemen pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 adalah salah satu yang mengatur tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, antara lain mengatur hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di mana yang menjadi titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya). Untuk menghilangkan distorsi itu, maka dapat dipahami kalau peraturan dan perundang-undangan ini tidak hanya mengatur masalah ekonomi daerah tetapi juga masalah non ekonomi yang semuanya diserahkan kepada efisiensi pelaksanaan pembangunan secara umum.

Tetapi eronisnya, Indonesia sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau dan budaya dengan kondisi ekonomi dan sosial yang sangat beragam, nampaknya masih tetap memerlukan suatu sistem yang mampu mengatur hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara harmonis.

Perwujudan persatuan nasional menghendaki suatu perlakuan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan pembangunan antar daerah yang seimbang dengan mempertimbangkan kondisi daerah. Akan tetapi sejauhmana hal tersebut mendapat perhatian dalam konsep manajemen pembangunan Indonesia, masih merupakan permasalahan yang memerlukan kearifan dalam upaya pengkajian lebih lanjut.

Dalam kaitannya dengan tulisan ini disadari bahwa konsep manajemen pembangunan pedesaan secara eksplisit telah diatur melalui perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa. Adapun pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 diarahkan kepada usaha memperkuat kedudukan pemerintahan desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta mampu menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif.

Oleh karena itu penting untuk ditandaskan bahwa pemerintahan desa adalah seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan desa, dengan sasaran pola penyeragaman, agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan

dan mampu menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa, tetapi dalam kenyataannya, meskipun ada keseragaman pola pengaturan, namun tingkat keberhasilannya masih menunjukkan perbedaan-perbedaan yang bervariasi.

Perbedaan-perbedaan yang dimaksud secara nyata dapat dilihat di antara kabupaten, maupun diantara kecamatan dalam satu kabupaten bahkan terdapat pula perbedaan keberhasilan diantara desa-desa dalam satu kecamatan.

Tingkat keberhasilan dari berbagai program pembangunan yang dilaksanakan dalam suatu wilayah tertentu menunjukkan pula perbedaan-perbedaan atau variasi yang nyata. Suatu wilayah yang dinilai sangat berhasil dalam program pembangunan tertentu, nampaknya bukan merupakan suatu jaminan terhadap keberhasilan pelaksanaan program pembangunan lainnya. Perbedaan-perbedaan hasil pelaksanaan programs baik antar wilayah maupun antar program perlu dikaji secara mendalam guna memperoleh pengertian yang lebih tepat dan pemahaman yang lebih luas mengenai manajemen pembangunan, baik untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kebutuhan perumusan kebijaksanaan program pembangunan pada umumnya.

Demikian halnya dengan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Sinjai Barat dimana tingkat keberhasilan pembangunan antar desa masih menunjukkan variasi yang nyata sehingga sangat menarik untuk menjadikan sebagai lokasi penelitian.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Peran aktif negara/pemerintah dalam mendorong dan melaksanakan pembangunan nasional dilakukan melalui perumusan, penetapan, pelaksanaan dan pengawasan kebijaksanaan pembangunan. Kebijaksanaan adalah arah kegiatan yang ditetapkan dalam rangka memecahkan suatu permasalahan dalam hal ini masalah pembangunan.

Kebijaksanaan pembangunan yang bersifat mendasar sering disebut sebagai strategi pembangunan. Kebijaksanaan pembangunan ini pada umumnya dijabarkan dalam suatu perencanaan pembangunan dan program-program (investasi) pembangunan.

Dalam kebijaksanaan pembangunan termasuk upaya untuk mengarahkan kegiatan masyarakat dalam pembangunan. Karena hakekatnya pembangunan nasional memang usaha masyarakat bangsa bukan hanya pemerintah saja. Dengan perencanaan pembangunan dimaksudkan agar pembangunan dapat terselenggara secara berencana, yaitu secara sadar, teratur, sistematis, berkesinambungan, mengusahakan peningkatan, dan kemampuan menahan gejolak-gejolak dalam pelaksanaannya.

Dalam kaitannya dengan usaha pembangunan daerah pedesaan, maka pemerintah sebagai “**agent of change**” telah menciptakan berbagai lembaga/organisasi yang diharapkan mampu berfungsi sebagai katalisator yang positif dalam usaha mendinamisir masyarakat desa menuju kepada suatu perkembangan yang mempunyai kekuatan sendiri. Oleh karena itu

untuk pembangunan pedesaan dalam kenyataannya didapati berbagai organisasi/lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan harapan untuk memenuhi fungsi-fungsi atau menjalankan peranan-peranan tertentu yang dipandang perlu dalam usaha mendorong pembangunan daerah pedesaan. Namun karena tujuan-tujuan yang akan dicapai dari proses pembangunan pedesaan mempunyai keanekaragaman, maka organisasi/lembaga yang didirikan atau diprakarsai pembentukannya juga diharapkan memenuhi dan menjalankan sejumlah fungsi-fungsi tertentu. Akan tetapi dalam pembahasan ini permasalahannya sengaja diarahkan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana perumusan perencanaan pembangunan pedesaan di Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembangunan pedesaan di Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai ?
3. Bagaimana pengawasan pembangunan pedesaan di Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai ?
4. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan di Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perumusan perencanaan pembangunan pedesaan di Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.

2. Untuk menggambarkan pelaksanaan pembangunan pedesaan di Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.
3. Untuk mengungkapkan pelaksanaan pengawasan pembangunan pedesaan di Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.
4. Untuk mengetahui pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan di Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai ?

Kegunaan hasil penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai bahan informasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijaksanaan, khususnya yang berhubungan dengan bidang manajemen pembangunan pedesaan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi pihak yang bermaksud mengadakan kajian manajemen pembangunan pedesaan.

D. Metodologi Penelitian

1. Tipe dan dasar penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif yakni suatu tipe penelitian yang disamping berupaya menggambarkan pelaksanaan manajemen pembangunan pedesaan yang meliputi "fungsi-fungsi perencanaan , pelaksanaan koordinasi, dan pengawasan, juga bermaksud menelaah

hubungan antara pelaksanaan manajemen pembangunan yang dimaksud dengan hasil-hasil yang dicapai dari pelaksanaan pembangunan pedesaan

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian ini adalah terdiri dari :

- aparat kecamatan. = 18 orang
 - aparat kelurahan, = 42 orang
 - pengurus BPD = 72 orang
 - tokoh-tokoh masyarakat = 80 orang
- Jumlah = 212 orang

b. Sampel

Pemilihan sampel dilakukan secara bertahap, pertama, pemilihan cluster sampling dilakukan untuk menentukan pada desa mana yang akan terpilih. Setelah tahap ini selesai, tahap kedua dilakukan dengan proporsive sampling terhadap aparat camat, aparat desa dan pengurus/anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta anggota masyarakat yang bukan anggota BPD.

Sehubungan dengan itu, maka dalam penelitian ini telah dipilih 3 (tiga) desa sebagai sampel yang dianggap representatif. Adapun desa yang dipilih adalah :

Tassililu	(Desa swasembada)
Bontosalama	(Desa swakarya)
Turungan Baji	(Desa Swadaya)

Pemilihan desa tersebut didasarkan pada alasan :

Desa/Kelurahan Tassililu merupakan ibukota Kecamatan Sinjai Barat dimana keadaan desa sudah mencapai desa swasembada.

Desa Bontosalama adalah merupakan desa dimana wilayahnya sebagian pegunungan dan sebagian daratan yang sudah mencapai tingkat desa swakarya

Desa Turungan Baji adalah merupakan desa pedalaman yang hampir seluruhnya adalah pegunungan dimana desa ini masih berstatus sebagai desa swadaya

Sedangkan yang menjadi sampel responden dipilih secara purposive sebanyak 100 orang dengan rincian sebagai berikut :

Aparat Kecamatan	=	10 orang
Desa	=	15 orang
Pengurus/anggota BPD	=	30 orang
Tokoh/anggota masyarakat	=	45 orang
<hr/>		
Jumlah	=	100 orang

Kemudian yang menjadi informan adalah pegawai Kantor Kecamatan Sinjai Barat, para pelaksana proyek pembangunan, dan tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui atau yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan.

3. Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi/pengamatan adalah data-data dikumpulkan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lapangan berdasarkan obyek penelitian.
- b. Interview/wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan responden atau informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disediakan.
- c. Kuesioner/angket yaitu daftar pertanyaan yang diedarkan oleh peneliti kepada seluruh responden yang selanjutnya responden mengisi daftar pertanyaan tersebut.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tabulasi langsung, yakni di mana data yang dikumpulkan langsung ditabulasi dari kuesioner ke rangka tabel yang telah disiapkan tanpa proses perantara lainnya. Disamping itu pengolahan data juga dilakukan secara kualitatif untuk mengetahui hubungan pelaksanaan manajemen pembangunan dengan hasil-hasil yang dicapai dari pelaksanaan pembangunan pedesaan.

Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif sederhana dengan menggunakan tabel frekuensi untuk mengetahui hubungan pelaksanaan manajemen pembangunan dengan hasil-hasil pembangunan. Selain analisis kuantitatif ini, juga didukung dengan analisis kualitatif untuk

mengetahui proses pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan pada lokasi penelitian.

E. Kerangka Konseptual

Dewasa ini masyarakat bangsa Indonesia sedang melakukan usaha besar bersama, yaitu pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Pembangunan yang meliputi baik usaha memperoleh kemajuan ekonomi, pengembangan ke arah masyarakat maju, menggalang pembangunan bangsa yang berkeadilan.

Pada dasarnya manajemen mempunyai prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi yang dikembangkan secara rasional dan universal. Namun dalam penerapan pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh keberhasilannya atau penyesuaian bahkan penggunaan unsur-unsur corak dan ciri budaya bangsa. Apalagi bila kita melihatnya sebagai manajemen pembangunan, manajemen masyarakat membangun dan manajemen membangun masyarakat.

Sehubungan dengan itu maka dalam pembahasan ini digunakan pendekatan manajemen pembangunan yang menganalisa pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Berdasarkan fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh beberapa pakar administrasi baik dalam negeri maupun luar negeri, maka fungsi-fungsi organik manajemen tersebut dalam kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas pada kajian ini telah disederhanakan dalam

bentuk yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi. Penyederhanaan bentuk dari fungsi-fungsi manajemen tersebut juga dilandasi dengan suatu asumsi pemikiran yang menegaskan bahwa dengan perencanaan yang matang disertai dengan pelaksanaan yang tepat, koordinasi yang mantap, pengawasan yang ketat serta didukung dengan evaluasi yang obyektif akan menentukan keberhasilan pembangunan.

Secara skematis asumsi pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai isi dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi nantinya, maka penulis mencoba menguraikan dalam bentuk sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama adalah **pendahuluan** diuraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah **tinjauan pustaka** diuraikan tentang beberapa pengertian, perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan pembangunan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan.

Bab Ketiga adalah **Gambaran Umum Lokasi Penelitian** digambarkan tentang keadaan geografi dan demografi, struktur organisasi dan tata kerja Kantor Kecamatan Sinjai Barat, dan keadaan pegawai.

Bab keempat adalah **hasil dan pembahasan penelitian** yang diuraikan adalah pelaksanaan perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan pelaksanaan pembangunan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan.

Bab kelima adalah **penutup** yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian

1. Pengertian Manajemen

Manajemen dapat berarti pencapaian tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu, tetapi dalam hal ini belum ada persamaan pendapat dari para ahli manajemen tentang apa fungsi-fungsi itu. Salah satu klasifikasi paling awal dari fungsi-fungsi manajerial dibuat oleh Henry Fayol dalam Hani Handoko (1996 : 21) menyatakan bahwa *“perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pemberian perintah dan pengawasan adalah fungsi-fungsi utama”*.

Kemudian Stoner dalam Hani Handoko (1996 : 8) memberikan definisi manajemen sebagai berikut :

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya – sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kedua pengertian manajemen di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, koordinasi, pengawasan dan evaluasi.

2. Pengertian Pembangunan

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu usaha perubahan menuju ke keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Perubahan yang direncanakan dengan pendayagunaan potensi alam, manusia, dan sosial budaya yang tumbuh dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Bintoro Tjokroamdjojo (1994 : 25) mengatakan bahwa *"Pembangunan adalah suatu usaha perubahan dari suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan tertentu kepada suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan yang dianggap lebih baik"*.

Jelaslah bahwa yang dimaksud pembangunan di sini adalah suatu usaha mengadakan perubahan dari yang tidak baik menjadi baik dan dari keadaan yang baik menjadi lebih baik lagi.

Menurut Siagian (1992 : 1-2) memberikan pengertian pembangunan yaitu .

"Pembangunan itu adalah suatu usaha rangkaian pertumbuhan pembangunan yang berencana secara sadar oleh suatu bangsa atau negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa."

Apabila pengertian di atas dianalisa lebih lanjut maka akan terlihat beberapa pengertian pokok yang sangat penting diperhatikan seperti :

- a. Pembangunan merupakan suatu proses yang berarti dalam suatu keinginan yang terus menerus dilaksanakan.

- b. Pembangunan merupakan suatu usaha secara sadar dilaksanakan.
- c. Pembangunan dilakukan secara berencana berorientasi terhadap pertumbuhan dan perubahan.
- d. Pembangunan itu ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa.

Agar suatu pembangunan memperoleh sukses dan lancar maka momentum yang timbul dari gerak pertama digunakan untuk menggerakkan usaha yang lain, disamping maka dalam pembangunan ini pun kita harus bekerja secara bertahap. Kita mulai dengan hal-hal yang sudah kita kenal di daerah itu kemudian meningkatkan kepada hal-hal yang modern setelah usaha pertama mencapai sukses.

3. Pengertian Desa

Apa yang dimaksud dengan desa, atau lebih tegas lagi definisi desa. Prof. Bintoro dalam bukunya "Sosiologi Kota dan Desa : *"Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri"* (1999 ; 94).

Selanjutnya definisi desa menurut Prof. Drs. R. Bintarto yang dikutip oleh Drs. I Nyoman Beratha dalam bukunya "Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa mengatakan sebagai berikut :

"Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiologis sosial ekonomi, politis dan cultural yang terdapat di situ dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain"(1982 : 26)

Jadi jelaslah bahwa desa merupakan perwujudan geografis dan juga merupakan kesatuan hukum, sosial ekonomi, politik dan cultural di mana bertempat tinggal masyarakat untuk mengadakan interaksi dengan daerah-daerah lain dan mengadakan pemerintahan sendiri.

4. Pembangunan Desa

Dalam upaya mengisi kemerdekaan bangsa, maka perlu melaksanakan kegiatan pembangunan di tingkat desa yang merupakan rangkaian kegiatan nasional.

Berdasarkan pengertian pembangunan dan desa di atas maka peneliti lebih lanjut memberikan pengertian pembangunan desa/pedesaan seperti yang dikemukakan oleh Prayitno dan Arsyad (1997 : 15) bahwa *"pembangunan pedesaan adalah suatu strategi pembangunan yang dirangsang dalam peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial dari kelompok khusus masyarakat, yaitu si miskin di pedesaan."*

Kemudian oleh Kuswara (1995 : 20) memberikan pengertian yang lebih luas yaitu :

1. Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyat yang dalam penyelenggaraannya harus secara menyeluruh dan terkoordinasi.
2. Pembangunan desa adalah mensyaratkan adanya kewajiban bersama yang seimbang dan serasi antara pemerintah dan masyarakat.
3. Pembangunan desa adalah multi sektoral dan merupakan perpaduan daripada program-program sektoral, regional dan Inpres dengan kebutuhan esensial masyarakat.

4. Pembangunan desa adalah merupakan usaha pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan desa baik pedesaan maupun perkotaan.

Dari pengertian tersebut di atas jelas bahwa sesungguhnya pembangunan desa merupakan suatu rangkaian dalam pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan didasarkan kepada tugas dan kewajiban masyarakat desa secara keseluruhan.

B. Perencanaan Pembangunan

Dalam berbagai literatur tentang administrasi dan manajemen tercantum bahwa perencanaan merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Sebagai salah satu fungsi organik manajemen mutlak harus dilakukan dalam pembangunan, sebagaimana dikatakan oleh Sondang P. Siagian (1974 : 75) mengemukakan bahwa;

Perencanaan merupakan kegiatan yang mutlak dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi, apapun tujuan dan sasaran serta kegiatannya dan tanpa melihat apakah organisasi itu besar atau kecil. Karena sifatnya yang organik, perencanaan merupakan salah satu langkah yang amat penting dalam proses administrasi.

Demikian halnya dalam upaya pelaksanaan pembangunan dimana perencanaan merupakan salah satu fungsi yang amat menentukan. Oleh karena itu Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang membangun/berkembang telah melaksanakan perencanaan yang secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Setiap lima tahun disusun suatu rencana jangka panjang yang ditetapkan oleh MPR dalam bentuk Garis-Garis Besar Haluan Negara (Garis-garis Besar Haluan Negara). Pemerintah dengan menampung dan menerima masukan dari berbagai pihak (Universitas, lembaga-lembaga penelitian, organisasi masyarakat dan lain-lain) menyampaikan suatu rancangan Garis-garis Besar Haluan Negara pada MPR. Kemudian Garis-garis Besar Haluan Negara ini menjadi pedoman bagi presiden sebagai mandataris MPR untuk menjabarkan hal itu dalam rencana jangka menengah yakni Repelita.

Rencana jangka panjang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara lebih bersifat suatu rencana berdasar pendekatan pembangunan bangsa. Dalam rencana tersebut dirumuskan tujuan pembangunan nasional ialah "Pembangunan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spritual berdasarkan Pancasila". Kemudian disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah "Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia".

Repelita merupakan suatu rencana yang bersifat indikatif dan terutama menyandarkan pada public investment. Koordinasi perencanaan diletakkan pada kerangka makro ekonomi rencana yang memperkirakan keperluan investasi nasional berdasarkan COR tertentu untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi tertentu. Kemudian dilakukan disagregasi dalam investasi sektoral yang menunjang perubahan struktur ekonomi Indonesia. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan jangka menengah

pada dasarnya adalah suatu perencanaan ekonomi. Karena keputusan politik untuk menanggulangi keadaan ekonomi yang berat di tahun 1999, maka pembangunan ekonomi adalah prioritas utama dengan dasar alasan bahwa pembangunan ekonomi juga ditujukan ke arah kesejahteraan sosial yang lebih baik dan karena peralatan analisis yang ada untuk perencanaan ekonomi yang memadai.

Kemudian rencana tahunan berisi program-program dan proyek pembangunan di berbagai bidang yang kemudian dituangkan lagi dalam perencanaan proyek-proyek (project-plan).

Rencana jangka panjang disusun dan dirumuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas dasar saran rancangan pemerintah. Rencana jangka menengah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang kemudian disetujui oleh pemerintah. Sudah barang tentu Bappenas menggunakan masukan-masukan dari berbagai pihak. Rencana tahunan disusun berdasarkan usulan-usulan dari Departemen/Lembaga kemudian diolah dan disetujui bersama oleh Bappenas dan Dirjen Anggaran Departemen Keuangan. Untuk dapat masukan pertimbangan regional dilakukan konsultasi nasional antara Badan-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang menyerasikan saran rencana dari tingkat daerah dengan Bappenas dan departemen-departemen di pusat.

Demikian secara ringkas mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia.

Pada tingkat daerah dilakukan perencanaan daerah untuk oleh Bappeda Propinsi, untuk kabupaten oleh Bappeda Kabupaten, untuk kecamatan melalui apa yang disebut sebagai Unit Kerja Daerah Pembangunan (UDKP), di tingkat desa melalui Badan Perwakilan Desa (BPD). Pada dasarnya perencanaan pembangunan di tingkat daerah ini masih lemah.

Untuk mengantisipasi kelemahan-kelemahan tersebut telah dilaksanakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan perencanaan daerah ini melalui program latihan perencanaan dan manajemen pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan di Indonesia masih bisa dilakukan lebih dominan top down. Namun secara bertahap dikembangkan perencanaan dari bawah (bottom up), terutama untuk proyek-proyek pada tingkat pedesaan dan regional.

Cara ini dikembangkan melalui perencanaan atau usul-usul rencana dari BPD di tingkat desa kepada UDKP di tingkat kecamatan dan dari sini ke Bappeda Kabupaten, untuk proyek-proyek pembangunan Daerah Kabupaten. Dengan ini diharapkan rencana-rencana lebih sesuai dengan kepentingan

daerah. Demikian pula untuk rencana dari Bappeda Kabupaten kepada Bappeda Propinsi untuk proyek-proyek pembangunan Propinsi.

Perencanaan sebagai salah satu fungsi organik manajemen merupakan kegiatan yang mutlak dilakukan dalam aktivitas pembangunan dewasa ini yang dilaksanakan secara sadar dan berencana dalam rangka mencapai hasil yang maksimal dari usaha pembangunan.

Bintoro Tjokroamidjojo (1989 : 189) mengatakan bahwa ; *karena perencanaan yang merupakan suatu proses yang kontinu di mana proses yang kontinu ini meliputi dua aspek yaitu formulasi rencana dan pelaksanaannya.* Dengan demikian proses perencanaan dapat dimulai dengan suatu rencana pembangunan atau mungkin hanya dengan formulasi kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan kemudian diikuti dengan berbagai langkah-langkah kegiatan untuk merealisirnya. Walaupun diakui bahwa suatu rencana pembangunan memang merupakan suatu alat yang lebih baik untuk proses perencanaan dan pelaksanaannya.

Lebih lanjut Bintoro Tjokroamidjojo (1989 : 189) mengatakan bahwa :

Dengan melihat perencanaan sebagai suatu proses yang meliputi formulasi rencana dan implementasinya, dapatlah diusahakan rencana itu bersifat realistis dan dapat menanggapi masalah-masalah yang benar-benar dihadapi. Dengan demikian rencana merupakan alat bagi implementasi, dan implementasi hendaknya berdasar suatu rencana.

Dalam hubungannya dengan pembahasan ini, dimana proses pembangunan pedesaan juga memerlukan perencanaan yang kontinu, dan oleh karenanya dalam proses perencanaan pembangunan pedesaan perlu kiranya terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- ❖ Sifat rencana itu sendiri sebagai dasar pelaksanaannya sudah mengandung ciri-ciri yang berorientasi kepada pelaksanaan, dalam arti memungkinkan untuk pelaksanaannya ini berarti pula supaya dalam perencanaan sudah diperhatikan kapasitas administratif bagi pelaksanaannya. Masalah pelaksanaan rencana perlu sudah dipertimbangkan di dalam waktu perencanaannya. Dengan demikian dimaksudkan sudah terdapat jaminan yang lebih besar dalam merealisasikan tujuan sasaran-sasaran rencana.
- ❖ Proses perencanaan tetap mengandung unsur kontinuitas dan fleksibilitas. Oleh karena itu perlu terus menerus dilakukan reformasi rencana dan re-implimentasi dalam pelaksanaannya. Untuk keperluan ini, maka di dalam perencanaan dikembangkan apa yang disebut rolling plan. Suatu rolling plan adalah cara perencanaan di mana pada tiap akhir tahun atau periode tertentu pelaksanaan rencana disesuaikan kembali dengan sasaran-sasaran, program-program dan proyek-proyek rencana untuk tahun atau periode tertentu berikutnya.
- ❖ Mengusahakan perencanaan dapat seoperasional mungkin. Mengenai hal ini antara lain diusahakan penggunaan apa yang disebut perencanaan operasional tahunan.

- ❖ Adanya sistem pengendalian pelaksanaan pembangunan yang menggunakan keserasian antara pelaksanaan dan perencanaan.
- ❖ Bagi proses penyesuaian kembali rencana dan pelaksanaan serta bagi pengendalian pelaksanaan diperlukan adanya sistem pelaporan dan evaluasi dalam proses perencanaan. Hal ini dinamakan sistem “feed back”, memberikan informasi tentang pelaksanaan yang diperlukan bagi pengambilan keputusan perencanaan kembali atau koreksi dalam pelaksanaan rencana.

C. Pelaksanaan Pembangunan

Perhatian yang lebih besar daripada administrasi pembangunan ialah di bidang pelaksanaan rencana pembangunan, sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjajo (1989 : 189) bahwa ; *Telah diakui bahwa proses perencanaan tidak berhenti pada penyusunan suatu rencana tetapi dalam realisasi pelaksanaan secara baik. Yang penting bukan saja tahap perencanaan tetapi juga pelaksanaan rencana.*

Pelaksanaan sebagai kelanjutan dari proses perencanaan akan menentukan apakah suatu kebijaksanaan atau program pembangunan dapat terwujud sesuai dengan rencana (out put) dan perwujudannya itu mencapai hasil (achieving results) sesuai dengan tujuan suatu program pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan (out comes).

Dengan memahami pelaksanaan sebagai tindak lanjut dalam proses perencanaan, maka dalam perencanaan itu sudah harus terdapat ciri-ciri yang lebih menjamin pelaksanaan yang sesuai dengan rencananya. Kecuali itu, pelaksanaan rencana terutama tergantung pada lingkungan politik serta administrasi sesuatu negara pada sesuatu waktu tertentu. Pertama adalah dukungan dan penerimaan elite pemerintah terhadap rencana dan komitmen terhadap pelaksanaannya. Kedua adalah terdapatnya suatu derajat kestabilan politik dan dalam pemerintahan, karena realisasi rencana memerlukan suatu tingkat pematangan tertentu. Ketiga adalah kemampuan administrasi negara yang ada dan prospek untuk penyempurnaannya dalam rangka pelaksanaan rencana.

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan pedesaan, maka dapat diasumsikan bahwa pembangunan dilaksanakan berdasarkan rencana pembangunan pedesaan yang telah disusun melalui rapat Badan Perwakilan Desa (BPD). Di mana dalam rencana pembangunan itu telah dirumuskan teknik operasionalnya dengan memperhitungkan segala faktor yang terkait dengan aspek pelaksanaan rencana pembangunan.

Sepanjang proses penyusunan rancangan, pentingnya manajemen bagi keberhasilan proyek muncul sebagai pokok persoalan. Bryant and White (1989 :167) mengatakan bahwa :

Manajemen proyek yang baik merupakan satu-satunya variabel terpenting yang mempengaruhi hasil proyek. Kebanyakan tim perancang mengetahui fakta ini, tetapi sangat sedikit yang tahu secara pasti apa yang harus dilakukan mengenai hal itu. Karena perannya yang menentukan dalam mewujudkan proyek itu dari papan gambar ke

dalam kenyataan tiap rancangan proyek harus disertai dengan strategi pelaksanaan sebagai bagian dari dokumentasi proyek.

Sehubungan dengan itu dalam upaya pelaksanaan program pembangunan pedesaan dituntut kemahiran yang sempurna untuk bekerjasama dan memotivasi orang lain. Dalam hal ini menjadi tugas bagi organisasi/lembaga yang ada di pedesaan untuk lebih bersungguh-sungguh memperhatikan upaya pencapaian tujuan pembangunan pedesaan.

Taliziduhu Ndraha (1993 : 15) mengatakan bahwa :

Pembangunan pedesaan dalam bahasan ini diartikan sebagai nsuatu proses yang dilakukan secara sadar untuk meningkatkan :produksi pertanian, pendapatan masyarakat, peningkatan kesejahteraan dalam arti peningkatan kesehatan, gizi, pendidikan dan kesejahteraan lainnya. Sementara itu pembangunan desa adalah pembangunan yang sepanjang prosesnya masyarakat desa yang bersangkutan diharapkan berpartisipasi aktif, dan dikelola di tingkat desa.

Dengan demikian dapat diketahui, bahwa yang menjadi pelaksana pembangunan pedesaan adalah seluruh masyarakat pedesaan sehingga dalam hal ini rangkaian kegiatan dalam rangka pembangunan pedesaan disalurkan atau dijalankan oleh sejumlah organisasi/lembaga, baik yang merupakan bagian dari organisasi Pemerintah pusat dan daerah serta instansi vertikal, maupun yang dibentuk oleh masyarakat sendiri dengan atau tanpa prakarsa pemerintah. Termasuk dalam hal ini organisasi atau perorangan yang berusaha dengan kekuatan sendiri (swasta), dan sebagian diantaranya dapat pula dilakukan oleh organisasi politik (partai dan golongan) atau langsung oleh Pemerintah desa.

Perlu dikemukakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan efektif dan efisien. sehubungan dengan itu dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan program-program pembangunan ditingkat desa, maka dikembangkanlah target clientele. Mereka inilah yang dibina keswadayaannya. Ada kontak tani, kelompok belajar, kecuali tentu saja murid-murid SD bersama orang tuanya, kelompok akseptor (diusahakan akseptor lestari), kelompok kesehatan masyarakat kelompok wanita di pedesaan dalam PKK dan kelompok generasi muda dalam Karang Taruna.

Sistem penentuan target dan “deliverynya” telah dirumuskan dalam tahap perencanaan baik oleh badan atau lembaga yang berwenang atau dalam badan/panitia koordinasinya. Hal ini juga dengan menggunakan masukan dari bawah/dari lapangan baik proyek/unit pelaksana maupun dari kelompok “target clientele” (bila sudah ada). Secara operasional banyak program-program/proyek sosial telah mempunyai atau mengembangkan apa yang disebut petunjuk-petunjuk operasionalnya (seringkali dirumuskan dalam suatu SK Menteri atau SKB beberapa Menteri). Oleh karena seringkali proyek-proyeknya menjadi wilayah kewenangan pelaksanaan antar departemen. Keserasiannya benar-benar diperlukan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan.

Studi-studi pelaksanaan ini bahkan merupakan suatu orientasi baru dalam administrasi pembangunan, yang menelaah masalah-masalah nyata dalam pelaksanaan berdasar pemahaman bahan yang dituju adalah

pencapaian hasil. Studi-studi implementasi ini juga sering dijadikan bahan telaah oleh lembaga bantuan/penelitian internasional.

Keberhasilan program/proyek pembangunan di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh adanya hubungan yang baik melalui dialog antara petugas lapangan atau pimpinan unit sebagai motivator dengan kekuatan kelompok yang bersedia menerima pembaharuan di tingkat lokal sebagai inovator.

Bintoro Tjokroamidjojo (1989 : 56) mengatakan bahwa:

Hubungan motivator-motivator ini penting di Indonesia yang sampai dewasa ini tingkat sosial antara daerah-daerah terutama di tingkat lokal masih sangat berbeda-beda. Namun demikian pengaruh yang terpenting tetap dari kepala desa. Merekalah motivator yang utama dan dalam hal keterpaduan diperlukan koordinator, mereka perlu berperan sebagai administrator pembangunan.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa kerangka konseptual dari implementasi atau pelaksanaan pembangunan menyangkut berbagai hal antara lain :

- ❖ Dalam setiap organisasi yang akan terlihat dalam pelaksanaan atau kebijaksanaan atau strategi tertentu perlu menentukan pembagian tugas-tugas utama serta langkah-langkah strategis yang hendak diambil secara logis dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaeen yang telah ditentukan.
- ❖ Menentukan secara jelas tentang siapa yang bertanggung jawab untuk tugas-tugas pokok apa, langkah-langkah apa dan keputusan-keputusan operasional apa.



- ❖ Menentukan satuan kerja mana dalam organisasi yang akan berperan sebagai satuan kerja strategis, baik yang sifatnya fungsional maupun departemental. Istilah “departemental” dipergunakan di sini dalam arti satuan kerja dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok dan bukan tugas yang sifatnya menunjang.
- ❖ Menentukan jenis, kualitas dan kuantitas dari sumber dana dan daya yang diperlukan dalam implementasi serta menjamin bahwa sumber-sumber tersebut tersedia pada saat diperlukan.
- ❖ Menentukan hasil pekerjaan yang diharapkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan oleh satuan kerja strategis dan orang-orang yang terdapat di dalamnya dikaitkan dengan jangka dan batas waktu pelaksanaan pada waktu yang sama seluruh kegiatan diharapkan telah terselenggara.
- ❖ Menentukan sistem motivasi yang akan digunakan agar para pelaksana mempunyai dorongan kuat untuk melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- ❖ Menentukan bentuk dan sikap tindakan disipliner yang akan diberlakukan apabila para pelaksana gagal atau kurang berhasil melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya.
- ❖ Menentukan bentuk, sifat dan intensitas pengikutsertaan para pelaksana dalam mendesain dan proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya operasional..

- ❖ Mengenalisa interrelasi kunci antara manusia, satuan-satuan kerja strategis dan berbagai kegiatan dalam setiap satuan organisasi yang memerlukan koordinasi, sekaligus menentukan sistem koordinasi yang akan diberlakukan.
- ❖ Menyusun program pendidikan dan latihan yang diperkirakan akan diperlukan dalam usaha menjamin tersedianya tenaga yang ahli dan terampil sesuai dengan berbagai tuntutan pelaksanaan.
- ❖ Menentukan sistem umpan balik yang diperlukan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan kegiatan operasional untuk dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan dalam kebijaksanaan.
- ❖ Menjamin adanya kepemimpinan yang efektif dalam menggerakkan dan mengemudikan organisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan strategi sedemikian rupa sehingga tujuan dan strategi sedemikian rupa sehingga tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan tercapai dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi.

Meskipun hal tersebut belumlah dapat dikatakan komprehensif, akan tetapi dari situ saja telah terlihat dengan jelas betapa rumitnya langkah-langkah persiapan yang harus diambil sebelum kebijaksanaan dilaksanakan. Demikian halnya dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan yang mana hal tersebut menjadi kerangka konseptualnya.

D. Pengawasan Pembangunan

Pada dasarnya pengawasan berarti pengamatan dan pengukuran sesuatu kegiatan operasional dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 17 Pengawasan dilakukan dalam usaha menjamin bahwa semua kegiatan terlaksana sesuai dengan kebijaksanaan, strategi, keputusan, rencana dan program kerja yang telah dianalisis, dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya dalam wadah yang telah disusun.

Jika dilihat dari segi prosesnya, maka apabila suatu rencana atau program kerja sedang dilaksanakan, serta merta pengawasan diperlukan untuk mengukur kemajuan yang telah dicapai, melihat apakah penyimpangan terjadi dan mengambil langkah-langkah perbaikan dalam proses pelaksanaan itu apabila diperlukan. Dengan perkataan lain, pengawasan berusaha mencegah terjadinya penyimpangan arah yang ditempuh oleh organisasi dari arah yang telah ditetapkan untuk ditempuh. Jadi dalam hal ini pengawasan juga dibutuhkan untuk memeriksa sistem manajemen, khususnya jenis-jenis insentif yang tersedia bagi para manajer dan anggota-anggota proyek lainnya untuk melaksanakan pekerjaan masing-masing.

Coralie Bryant dan Louise G. White dalam bukunya "Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang" menggunakan istilah pemantauan tentang pengawasan yang mana dijelaskan bahwa "*Dalam pemantauan dikumpulkan informasi mengenai proyek itu berlangsung*".¹⁸ Di sini terlihat bahwa yang dipentingkan adalah umpan balik yang kontinyu

mengenai cara penggunaan sumber-sumber dan cara-cara pelaksanaan yang tengah berlangsung. Data itu secara tetap disampaikan sebagai umpan balik bagi orang-orang yang terlibat dalam proyek sehingga dapat dilakukan perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian yang segera.

Dalam hubungannya dengan pengawasan pembangunan, maka Bintoro Tjokroamidjojo membagi saran pendiriannya ke dalam dua wilayah, yakni :

“Pertama, “Pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah itu sendiri” harus lebih digalakkan

Kedua, “Pengawasan dalam arti yang lebih luas” yaitu pengawasan yang terselenggara karena berjalan “tertib dan wibawa hukum”.

Dari pembagian tersebut di atas, maka yang pertama menunjukkan dua bidang kegiatan yang perlu dilakukan disarankan untuk ditingkatkan yaitu :

1. Pengawasan atasan langsung atau sistem pengendalian manajemen. Pada dasarnya pengendalian pencapaian tujuan dan sasaran dalam unit-unit birokrasi pemerintah harus dilakukan oleh setiap pemimpin dalam bidangnya masing-masing. Pengawasan ini dapat lebih berjalan baik apabila dikembangkan berbagai aturan pelaksanaan, rencana kegiatan dan biaya dari birokrasi pemerintah itu sendiri. Dalam bahasa lain disebut sebagai “administrative selfregulation”.
2. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan oleh aparat pengawasan birokrasi pemerintahan. Dalam hal ini diperlukan keterpaduan dan koordinasi dari sekian banyak aparat pengawasan itu.

Sementara itu faktor yang kedua dari saran dan pemikiran Bintoro Tjokroamidjojo merupakan hal yang esensial sekali karena hukum dan sistem peradilan menjadi tempat pengaduan dan pengayoman terakhir bagi masyarakat. Aparat hukum harus mampu menampung dan menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan yang memerlukan tindakan dan keputusan hukum. Oleh karena itu pertama-tama perlu diusahakan agar ketiga aparat penegak hukum dapat dijalankan tugas-tugas dengan tertib, bersih dan efektif. "Pengawasan judicial" juga perlu dikembangkan terhadap birokrasi pemerintahan antara lain melalui sistem peradilan administrasi negara.

Terlepas dari berbagai bentuk dan jenis pengawasan yang bisa dilakukan, maka dipandang perlu mengemukakan sasaran utama dari pengawasan itu sendiri yang meliputi :

- ❖ Untuk lebih menjamin bahwa kebijaksanaan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan dan strategi dimaksud.
- ❖ Untuk lebih menjamin bahwa anggaran yang tersedia untuk membiayai berbagai kegiatan operasional benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efisien dan efektif.
- ❖ Untuk lebih menjamin bahwa para anggota organisasi benar-benar berorientasi kepada kelangsungan hidup dan kemajuan organisasi sebagai keseluruhan dan bukan kepada kepentingan individu yang sesungguhnya

harus ditempatkan di bawah kepentingan yang lebih penting dan lebih luas yaitu kepentingan pembangunan.

- ❖ Untuk lebih menjamin penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kerja sedemikian rupa sehingga organisasi memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana tersebut.
- ❖ Untuk lebih menjamin bahwa standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin.
- ❖ Untuk lebih menjamin bahwa prosedur kerja ditaati oleh semua pihak.

Dalam kaitannya dengan pembangunan pedesaan, sesuai dengan definisi yang mendasarinya, mensyaratkan agar proyek-proyek erat dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan dan sumber-sumber daya di wilayah tertentu; oleh karenanya mengumpulkan data tentang wilayah tersebut dan mengevaluasi dampak proyek merupakan hal yang sentral dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pembangunan.

E. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Pembangunan sebagai proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya mengandung arti bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam proses itu, dalam arti masyarakat perlu berperan serta. Jadi peran serta atau partisipasi masyarakat merupakan bagian pproses dan definisi pembangunan.

Pada uraian sebelumnya, secara implisit telah diuraikan bahwa partisipasi oleh masyarakat atau partisipasi oleh pemanfaat proyek dalam pembuatan rancangan dan pelaksanaan proyek. Sungguhpun demikian, mengelola partisipasi bukanlah semata-mata melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan atau dalam tahap evaluasi proyek belaka. Dalam partisipasi tersirat makna dan integritas keseluruhan proyek itu. Partisipasi merupakan sikap keterbukaan terhadap persepsi dan perasaan pihak orang lain. Partisipasi berarti perhatian mendalam mengenai perbedaan atau perubahan yang akan dihasilkan suatu proyek sehubungan dengan kehidupan masyarakat; Partisipasi adalah kesadaran memenuhi kontribusi yang dapat diberikan oleh pihak-pihak lain untuk suatu kegiatan.

Administrasi pembangunan tidak hanya berarti kemampuan untuk menetapkan strategi pembangunan yang baik, kemudian diperinci dalam rencana-rencana dan diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan nyata yang efektif dalam pelaksanaan pemerintahan, tetapi juga hendaknya dapat menimbulkan respon dan kerjasama seluruh rakyat (dengan pengertian yang relatif) dalam proses pembangunan tersebut. Administrasi pembangunan juga berperan untuk melibatkan kegiatan masyarakat luas, sesuai dengan arah dan kebijaksanaan yang ditetapkan dalam proses pembangunan. Di sini terlihat empat aspek penting dalam rangka partisipasi dalam pembangunan yaitu :

1. Terlibatnya dan ikut sertanya rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara turut menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
2. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu yang sebaiknya. Oleh karena itu pada umumnya pemerintah perlu memberikan pengarahannya mengenai tujuan dan cara-cara mencapai tujuan pembangunan tersebut.
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik. Dalam hal ini tergantung dari sistem dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang berlaku bagi suatu negara.
4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipasi dalam pembangunan yang berencana. Program-program ini pada suatu tingkat tertentu memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka dan juga secara langsung melaksanakan sendiri serta memetik hasil program tersebut.

Kemudian tiga hal lainnya yang mendapat perhatian administrasi pembangunan dalam rangka partisipasi masyarakat adalah :

1. Masalah kepemimpinan

Unsur pertama dari proses pengendalian usaha dalam pembangunan ditentukan sekali oleh adanya serta kualitas kepemimpinan.

2. Komunikasi

Segi lain yang mendapat perhatian administrasi pembangunan untuk lebih terdapatnya partisipasi adalah komunikasi. Gagasan-gagasan kebijaksanaan dan rencana hanya akan mendapat dukungan, bila diketahui dan kemudian dimengerti.

3. Pendidikan

Masalah lain yang perlu mendapat perhatian dalam rangka partisipasi dalam pembangunan adalah pendidikan. Tingkat pendidikan yang memadai akan memberikan kesadaran yang lebih tinggi dalam berwarga negara, dan memudahkan bagi pengembangan identifikasi terhadap tujuan pembangunan yang bersifat nasional.

Dalam hubungannya dengan partisipasi masyarakat di dalam kerangka pembangunan pedesaan dapat dilihat sebagai peranan organisasi atau kelembagaan yang terlibat dalam pembangunan. Ini didasarkan pada asumsi, bahwa yang turut terlibat dalam proses pembangunan sebagai katalisator adalah rangkaian organisasi dan kelembagaan, baik pemerintah atau swasta, dan perorangan. Sistem kelembagaan dapat mendorong dan memperkuat partisipasi masyarakat jika kemampuan masing-masing lembaga atau organisasi tersebut berperan sesuai dengan fungsi-fungsi yang diharapkan akan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga tersebut.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis dan Demografi

1. Geografis

Kecamatan Sinjai Barat terdiri atas 6 desa dan 2 kelurahan antara lain: Desa Gunung Perak, Desa Bonto Salama, Desa Turunan Baji, Desa Boto Lempangan, Desa Arabika, Desa Barania, dan Kelurahan Tassililu, serta Kelurahan Balakia. Kantor Kecamatan Sinjai Barat dalam pelaksanaan tugasnya di Kecamatan dan di Desa/Kelurahan dibantu oleh Kepala Desa dan Lurah yang ada di Kecamatan Sinjai Barat.

Kecamatan Sinjai Barat adalah salah satu dari 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan dengan ibukota Manipi, dan mempunyai luas wilayah 135,53 Km² (perincian luas wilayah menurut Kelurahan/Desa lihat tabel 1. Sebagian besar daerah Kecamatan ini sudah dapat dijangkau oleh kendaraan roda dua atau roda empat. Kecamatan Sinjai Barat terletak di daerah pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Batas Administrasi Kecamatan Sinjai Barat adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bulu Poddo/Kabupaten Gowa.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sinjai Borong.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sinjai Tengah.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Tabel 1
Luas wilayah Kelurahan/Desa di Kecamatan Sinjai Barat Tahun 2001.

NO.	DESA/KELURAHAN	LUAS (Km2)	Jumlah Dusun
1	Gunung Perak	22,99	2
2	Arabika	9,46	3
3	Tassililu	5,44	5
4	Bonto Salama	32,63	7
5	Barania	18,78	3
6	Botolempangan	18,22	4
7	Turungan Baji	24,31	4
8	Balakia	3,70	2
Jumlah		135,53	28

Sumber : Kantor Kecamatan Sinjai Barat dalam tahun 2002.

Tabel di atas menunjukkan bahwa luas wilayah Kecamatan Sinjai Barat 135,53 Km2 dengan klasifikasi 2 Kelurahan dan 6 Desa.

Kondisi geografis Kecamatan Sinjai Barat sebahagian besar merupakan pegunungan dan merupakan penghasil sayuran terbesar di Kabupaten Sinjai.

2. Demografi

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan di segala bidang, sebagai yang telah direncanakan, maka penduduk adalah merupakan salah satu faktor utama yang menentukan berhasil-tidaknya tujuan pembangunan tersebut diwujudkan secara nyata.

Hal tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan dan penyebaran penduduk yang kurang merata, maka hal ini sangat mempengaruhi manfaat dari

hasil pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat Sinjai Barat pada khususnya.

Apabila kita bandingkan dengan semakin tingginya harga kebutuhan pokok dan semakin menyempitnya lapangan kerja, maka semakin nampak adanya ketidakserasian antara pertumbuhan atau perkembangan pembangunan dengan pola kehidupan masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah banyak melakukan usaha-usaha kebijaksanaan di dalam bidang kependudukan, seperti pengadaan program keluarga berencana dan transmigrasi lokal ke daerah-daerah yang masih kurang penduduknya.

Di dalam bidang program Keluarga Berencana bahwa hal ini dilakukan dalam rangka mengatasi laju pertumbuhan penduduk dan disamping itu dengan jalan ini masyarakat akan merasakan suatu kehidupan yang layak dan bahagia.

Tabel di bawah ini akan menggambarkan jumlah penduduk di wilayah kecamatan Sinjai Barat sebagai berikut :

Tabel 2.
Banyaknya Penduduk Dirinci Perdesa/Kelurahan tahun 2001

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK
1	Gunung Perak	2.661
2	Arabika	2.165
3	Tassililu	3.947
4	Bontosalama	3.937
5	Barania	1.679

6	Botolempangan	2.879
7	Turungan Baji	2.161
8	Balakia	1.126
Jumlah		20.555

Sumber : Kantor Kecamatan Sinjai Barat dalam tahun 2002.

Tabel tersebut di atas, menggambarkan bahwa kelurahan Tasalilu dan Desa Bontosalama terpadat penduduknya sedangkan kelurahan Balakia terendah penduduknya.

Dengan demikian dalam membicarakan masalah kepemimpinan, maka tidal, terlepas dari kaitan dengan soal kependudukan, sebagai orang atau sekelompok orang yang, duduk sebagai pengikut dalam mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan segala aktivitas pemimpin.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

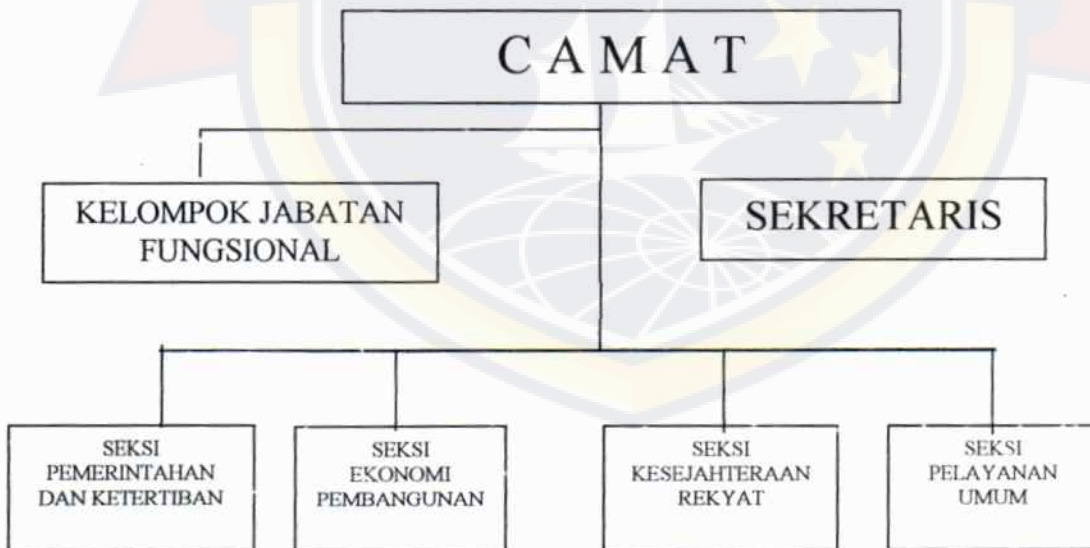
Berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan No. 44 Tahun 1999/tanggal 27 Pebruari 1998 tentang uraian dan tugas pemerintahan Kecamatan dan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten , Sinjai Nomor 26 tahun 2001. Ditetapkan bahwa Kecamatan Sinjai Barat dikepalai oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Camat dalam melaksanakan tugas pembinaan administrasi dan pelayanan teknis administratif dibantu oleh Sekretaris serta pelaksanaan tugas lainnya dibantu oleh Kepala Seksi dan Stafnya, sedangkan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di desa dan kelurahan dibantu Kepala Desa dan Lurah yang ada di Kecamatan Sinjai Barat.

Untuk mengetahui gambaran umum Kantor Kecamatan Sinjai Barat akan dibahas struktur organisasi dan tata kerja, sebagai berikut

a. Struktur organisasi kantor Kecamatan Sinjai Barat

Instansi yang merupakan suatu organisasi, karena instansi itu merupakan wadah untuk melaksanakan tugas yang dibebankan. Kantor Kecamatan Sinjai Barat yang merupakan suatu organisasi mempunyai struktur organisasi yang bertujuan untuk memberikan kejelasan tugas dan wewenang para pegawai menjalankan peranannya yang baik. Ibnu Syamsi (1994) mengatakan struktur organisasi adalah "kerangka yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat dan taigas, wewenang serta hubungannya satu sama lain yang masing-masing mempunyai peranan dalam lingkungan kesatuan yang utuh. Untuk struktur organisasi harus disusun secara efektif dan efisien.

Gambar 2. Bagan Struktur organisasi kantor Kecamatan Sinjai Barat.



Sumber : Kantor Kecamatan Sinjai Barat 2002

b. Tata kerja Kantor Kecamatan Sinjai Barat.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Sinjai nomor. 26 tahun 2001, tentang organisasi dan tata kerja Kantor Kecamatan Sinjai Barat, diatur mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi kantor Kecamatan Sinjai Barat.

1. Kedudukan

Kantor Camat Sinjai Barat berkedudukan di Kecamatan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Kecamatan Sinjai Barat mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati.

3. Fungsi

Kantor Kecamatan Sinjai Barat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pembinaan keagrariaan dan pembinaan kesatuan Bangsa.
- b. Pembinaan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan otonomi Desa, kependudukan serta ketentraman dan ketertiban.
- c. Pemberdayaan masyarakat Desa, dan sosial budaya.
- d. Pembinaan pelayanan umum kepada masyarakat.
- e. Pembinaan kesejahteraan sosial

- f. Penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga perkantoran.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan oleh Bupati.

C. Keadaan Pegawai

Untuk memperjelas keadaan pegawai pada kantor Kecamatan Sinjai Barat akan dikemukakan mengenai jumlah pegawai tingkat pendidikan formal, kepangkatan/golongan, jabatan dan Eselon.

a. Jumlah pegawai

Pegawai pada kantor Kecamatan Sinjai Barat terdiri atas jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dikemukakan dalam tabel 3.

Tabel 3.
Jumlah dan persentase Pegawai Kantor Kecamatan Sinjai Barat menurut jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSEN
1	Laki-Laki	13	72,22
2	Perempuan	5	27,78
JUMLAH		18	100

Sumber : Diolah dari data Kantor Kecamatan Sinjai Barat, 2002.

Tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa pegawai kantor Kecamatan Sinjai Barat berjumlah 18 orang yang terdiri atas jenis kelamin laki-laki 13 orang atau 72,22 persen dan perempuan 5 orang atau 27,78 persen, sehingga dapat dikatakan bahwa pegawai pada kantor Kecamatan Sinjai Barat sebagian besar berjenis kelamin laki-laki.

b. Pendidikan formal

Pendidikan formal pegawai kantor Kecamatan Sinjai Barat sangat bervariasi, pendidikan tertinggi adalah Sarjana (S 1), kemudian Diploma, SMU, SLTP dan pendidikan terendah adalah SD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4.
Frekuensi dan persentase Tingkat Pendidikan Formal
Pegawai Kantor Kecamatan Sinjai Barat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	FREKUENSI	PERSEN
1	Sekolah Dasar	4	22,22
2	SLTP	5	27,78
3	SMU	2	11,11
4	Diploma	6	33,33
5	Strata Satu (S1)	1	5,56
		18	100

Sumber : Diolah dari data Kantor Kecamatan Sinjai Barat 2002

Data tersebut memperlihatkan bahwa pegawai yang berpendidikan formal Sekolah Dasar sebanyak 4 orang atau 22,22 persen, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 5 orang atau 27,78 persen, Sekolah Menengah Umum 2 orang atau 11,11 persen, Diploma 6 orang atau 33,33 persen, dan Sarjana (S 1) 1 orang atau 5,56 persen. Dari data tersebut Tingkat Pendidikan Formal pegawai pada Kantor Kecamatan Sinjai Barat yang terbesar adalah pendidikan Diploma (Sarjana Muda) dan terkecil adalah Sarjana (S 1).

c. Golongan Ruang / Kepangkatan

Kepangkatan/golongan pegawai pada kantor Kecamatan Sinjai Barat terdiri atas Golongan I s/d III dikemukakan dalam tabel 5.

Tabel 5
Frekuensi dan Persentase Kepangkatan / Golongan
Pegawai Kantor Kecamatan Sinjai Barat

NO	PANGKAT/GOLONGAN	FREKUENSI	PERSEN
1	I A s/d I D	5	27,78
2	II A s/d II D	8	44,44
3	III A s/d III D	5	27,78
4	IV A s/d IV E	-	-
	JUMLAH	18	100

Sumber : Diolah dari data Kantor Kecamatan Sinjai Barat, 2002.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa golongan kepangkatan I sebanyak 5 orang atau 27,78 persen, golongan kepangkatan II sebanyak 8 orang atau 44,44 persen, golongan kepangkatan III sebanyak 5 orang atau 27,78 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa golongan kepangkatan pegawai kantor Kecamatan Sinjai Barat yang terbanyak adalah golongan kepangkatan II sedangkan golongan kepangkatan I dan III sama banyaknya, sementara golongan IV tidak ada.

d. Jabatan dan Eselon

Pada dasarnya pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan adalah untuk mempersiapkan pegawai dalam menduduki suatu jabatan dan Eselon. Berikut ini dikemukakan tabel Jabatan dan Eselon pada Kantor Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan tabel 6 tersebut, memperlihatkan jabatan Kepala Kecamatan Sinjai Barat dengan Eselon III a terdiri dari 1 orang, jabatan sekretaris Camat Eselon IVa terdiri dari 1 orang, Kepala Seksi dengan Eselon IVb terdiri dari 4 orang dan staf atau teknis sebanyak 12 orang.

Tabel 6
Frekuensi Jabatan dan Eselon PNS Kantor Kecamatan Sinjai Barat

NO	JABATAN	ESELON	FREKUENSI
1	Kepala Kecamatan	III D	1
2	Sekretaris Camat	III B	1
3	Kepala Seksi	III A	4
4	Staf/teknis	-	12
JUMLAH			18

Sumber : Diolah dari data Kantor Kecamatan Sinjai Barat, 2002.

e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kantor Kecamatan Sinjai Barat

Pendidikan dan Pelatihan Struktural yang telah diikuti oleh pegawai Kantor Kecamatan Sinjai Barat terdiri atas SPAMA dan ADUM, untuk lebih jelasnya dikemukakan dalam tabel 7.

Tabel 7.
Frekuensi dan persentase Diklat Pegawai Kantor Kecamatan Sinjai Barat

NO	JENJANG DIKLAT	FREKUENSI	PERSEN
1	Administrasi Umum	3	75
2	Sespa Tingkat Pertama	1	25
JUMLAH		4	100

Sumber : diolah dari data Kantor Kecamatan Sinjai Barat, 2002

Pada tabel 7 menggambarkan kegiatan pendidikan dan pelatihan struktural yang telah dilaksanakan pada kantor Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai sebanyak 4 orang. Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Administrasi Umum sebanyak 3 orang atau 75,00 persen dan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama 1 orang atau 25,00 persen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perencanaan Pembangunan Pedesaan

Seperti yang telah dikemukakan, bahwa perencanaan merupakan salah satu fungsi organik manajemen yang mutlak dilaksanakan dalam keseluruhan proses administrasi, sehingga sulit untuk dibantah akan fakta penyebarluasan perencanaan pembangunan yang kini terus berlangsung sampai ke unit-unit organisasi terkecil. Bahkan perangkat organisasi dipandang kurang lengkap kalau tidak mempunyai lembaga khusus yang merumuskan perencanaan.

Demikian pula di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia, telah kita kenal adanya lembaga yang khusus dirancang untuk merumuskan perencanaan pembangunan nasional yang tetap kita galakkan sampai sekarang ini. Lembaga yang dimaksud mempunyai tingkatan-tingkatan sesuai dengan struktur organisasi pemerintahan yang ada di Indonesia.

Secara garis besarnya dapat dikemukakan, bahwa untuk perencanaan pembangunan jangka panjang disusun oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas dasar saran rancangan pemerintah. Sedangkan Rencana jangka menengah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang kemudian disetujui pemerintah. Kemudian pada tingkat daerah untuk Propinsi disusun oleh Bappeda Tingkat Propinsi, dan untuk Kabupaten disusun oleh Bappeda Tingkat Daerah, kemudian untuk Kecamatan melalui apa yang

disebut sebagai Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP). Selanjutnya di tingkat desa perencanaan pembangunan disusun dan dirumuskan melalui Badan Perwakilan Pembangunan (BPD) yang dulu disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (BKMD).

Sehubungan dengan itu, maka untuk pelaksanaan fungsi perencanaan dalam kegiatan pembangunan pedesaan di Wilayah Kecamatan Sinjai Barat dilakukan melalui rapat-rapat atau Musyawarah Badan Perwakilan Desa (BPD) yang dipimpin oleh Kepala Desa bersangkutan. Biasanya dalam pertemuan atau rapat-rapat tersebut dihadiri oleh unsur Sub Direktorat Pembangunan Desa Kabupaten Sinjai yang ditugaskan untuk memberi pengarahan dalam rangka penyusunan rencana-rencana yang akan direalisasikan untuk tahun anggaran tertentu baik untuk urgensi proyek yang akan dibangun, maupun mengenai tata cara pengumpulan dana yang diperlukan.

Perlu dijelaskan, bahwa keterlibatan Kepala Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan di Kecamatan Sinjai Barat adalah merupakan konsekuensi logis dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Desa, yang antara lain ditegaskan, bahwa kepala desa/kelurahan adalah pimpinan tertinggi bidang pemerintahan, ia merupakan administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan hal itu, maka kepala desa sebagai pimpinan tertinggi dalam wilayah masing-masing menjadi tempat pengusulan perencanaan atau tempat konsultasi BPD dalam hal perencanaan yang akan dilaksanakan, di samping itu

kepala desa juga merupakan tokoh masyarakat yang perlu diikuti sertakan dalam pelaksanaan pembangunan di desanya.

Dengan demikian pembangunan yang hendak dilaksanakan pada gilirannya akan menjadi tanggung jawab pihak yang ada, baik pihak pemerintah maupun pihak anggota masyarakat lainnya, termasuk pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan itu sendiri.

Dalam proses perumusan perencanaan pembangunan pedesaan di Kecamatan Sinjai Barat telah ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Rencana/usulan proyek di tingkat desa disusun oleh BPD dengan bimbingan Camat yang dibantu oleh Kepala Urusan Pembangunan Desa Kecamatan. Rencana proyek ini disiapkan dan diolah dari bahan-bahan usulan proyek yang diajukan oleh BPD, dan disampaikan oleh Kepala Desa kepada camat.
2. Semua rencana/usulan proyek dari desa yang telah diterima camat, kemudian dibahas bersama-sama dengan instansi yang ada di tingkat kecamatan melalui diskusi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) dan temu Karya BPD di Tingkat Kecamatan, serta dilengkapi pembahasannya dalam rapat koordinasi lainnya di bawah bimbingan ketua Bappeda Kabupaten Sinjai dan Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Sinjai.
3. Rencana yang diterima dari tingkat kecamatan oleh Bupati Kepala Daerah, dikelola oleh BAPPEDA Kabupaten Sinjai bersama-sama Kepala Kantor Pembangunan Desa serta instansi yang ada dalam rapat koordinasi daerah pembangunan desa di Kabupaten Sinjai.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Kabupaten Sinjai, maka hasil pembahasan, selanjutnya dituangkan dalam suatu rencana proyek dari Kabupaten untuk kemudian diajukan kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan.

4. Setelah rencana diterima oleh Gubernur, maka dengan kegiatan yang sama seperti di kabupaten, hasilnya diteruskan oleh Gubernur kepada Bappenas dan Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah untuk mendapat pengesahan, sekaligus penentuan dananya yang menjadi bahan dalam APBN untuk tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Dengan disahkannya serta tersedianya dana proyek yang dilaksanakan di desa atas dasar biaya pusat (APBN), maka di tingkat propinsi oleh Gubernur Kepala Daerah beserta stafnya dan Bappeda Propinsi, Direktorat Pembangunan Desa serta Instansi Tingkat I lainnya, melakukan pengalokasian dana dan proyek untuk kabupaten dengan tetap memperhatikan dana yang ada di dalam APBN Kabupaten yang juga disediakan untuk proyek pembangunannya di desa. Hasilnya kemudian diteruskan kepada Bupati Kepala Daerah.
6. Setelah data diterima dari hasil pengolahan di tingkat I, maka di tingkat II juga dilakukan kegiatan yang sama seperti halnya dengan kegiatan yang telah dilakukan di tingkat I untuk kemudian melakukan pengalokasian dana dan proyek ke masing-masing kecamatan yang bersangkutan.
7. Berdasarkan perincian anggaran yang telah disusun oleh Bupati, dalam hal ini unit-unit atau instansi yang berwenang seperti : Bappeda, Bandes, serta instansi

lainnya, maka I tingkat kecamatan, camat juga melaksanakan kegiatan yang sama untuk setiap desa, dalam hal ini camat dibantu oleh Kepala Urusan Pembangunan Desa. Dalam melakukan perincian anggaran tersebut dipadukan dengan proyek dari prakarsa swadaya gotong royong masyarakat kemudian disajikan dalam Temu Karya di tingkat kecamatan dan diskusi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) serta forum koordinasi lainnya.

8. Di tingkat desa setelah menerima perincian anggaran untuk desa bersangkutan, maka kepala desa juga mengadakan rapat BPD dengan LMD untuk mengambil langkah-langkah dalam menghadapi pelaksanaan rencana tersebut. Dalam hal ini camat dibantu oleh Kepala Urusan Pembangunan Desa Kecamatan senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan rencana.

Demikian proses penyusunan rencana proyek pembangunan yang hendak dialokasikan di desa dengan menggunakan pembiayaan dari dana APBN, sedangkan mengenai rencana pembangunan yang pembiayaannya bersumber dari swadaya masyarakat, maka prosesnya hanya sampai ke tingkat kabupaten dengan kata lain, bahwa setelah rencana proyek disahkan dengan keputusan Bupati kepala daerah, maka rencana tersebut dapat dilaksanakan oleh desa bersangkutan.

Telah dikemukakan, bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia pada Repelita I masih meliputi berbagai keterbatasan kemampuan sehingga perencanaan pembangunan senantiasa didasarkan atas prioritas selektif. Oleh karena itu dalam rangka pembangunan pedesaan melalui pemanfaatan dana APBN

lebih diprioritaskan untuk pembiayaan prasarana desa yang pembiayaannya sulit diperoleh melalui gotong royong atau swadaya masyarakat bersangkutan. Dengan adanya skala prioritas tersebut, maka dalam rangka perumusan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh BPD yang ada di setiap desa dalam wilayah Pemerintahan Kecamatan Sinjai Barat senantiasa berpegang pada sasaran yang telah ditetapkan yakni mengutamakan peningkatan prasarana pembangunan desa yang dianggap masih sangat terbatas, antara lain :

- a. Prasarana perhubungan desa
- b. Prasarana produksi desa
- c. Prasarana pemasaran desa
- d. Prasarana sosial desa.

Dari keempat jenis prasarana tersebut, nampaknya masih tetap mendominasi lembaran perencanaan pembangunan di tingkat desa dan hal ini memang memiliki alasan yang cukup obyektif, karena selain keterbatasan prasarana itu sendiri yang menuntut perhatian dalam rangka peningkatannya, juga upaya pembangunan di bidang lainnya, khususnya dalam menunjang kelancaran kegiatan perekonomian masyarakat pedesaan sehingga pada gilirannya akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diharapkan dalam setiap pelaksanaan pembangunan.

Untuk lebih memperjelas aktor dominan penyusun rencana pembangunan di tingkat desa disajikan pada tabel 8 berikut ini.

Tabel 8

Tanggapan Responden Aktor Dominan Penyusun Rencana
Pembangunan Desa Di Wilayah Kecamatan Sinjai Barat

Respondien	I		II		III		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%
1. BPD	40	100	30	100	12	40	82	82
2. Kepala Desa					10	33	10	10
3. Camat					5	17	5	5
4. Masyarakat					3	10	3	3
T o t a l							100	100

Sumber : Hasil Penelitian di Tiga Desa tahun 2002

Keterangan : I. Aparat Camat/Aparat Desa
II. Pengurus Anggota BPD
III. Anggota Masyarakat

Deskripsi data pada tabel 8 menunjukkan, bahwa 82 orang atau 82 persen responden yang dijadikan sampel dari tiga desa menunjukkan BPD sebagai penyusun rencana pembangunan di desa, sedangkan yang menunjuk Kepala Desa sebagai penyusun rencana pembangunan di desa adalah sebanyak 10 orang atau 10 persen responden. Kemudian 5 orang atau 5 persen responden yang menunjuk Camat sebagai penyusun rencana pembangunan dan 3 orang atau 3 persen responden yang menunjuk masyarakat sebagai penyusun rencana pembangunan di desa.

Berdasarkan persentase data pada tabel 8 di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang menyusun rencana pembangunan desa di wilayah Kecamatan Sinjai Barat adalah Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan kata lain, bahwa yang lebih dominan menyusun rencana pembangunan desa adalah

pengurus/anggota BPD dan oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa BPD di Kecamatan Sinjai Barat telah melaksanakan fungsi perencanaan sebagai salah satu fungsi yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

Kiranya telah cukup jelas, meskipun dengan kapasitas yang masih relatif terbatas, BPD di Kecamatan Sinjai Barat telah melaksanakan salah satu fungsi manajemen berupa perencanaan yang mendasari pembentukannya, dan karena keterbatasan kapasitas administratif yang dimiliki oleh pengurus/anggota BPD sehingga dapat dimaklumi kalau sampai dewasa ini masih sering terjadi kesenjangan pembangunan di tingkat desa karena fungsi koordinasi perencanaan bottom up dan top down belum dapat dipertemukan secara rasional.

B. Pelaksanaan Pembangunan Pedesaan

Setelah tahap perencanaan selesai, maka langkah berikutnya mengarah kepada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya operasional. Jadi kebijaksanaan dan strategi yang telah ditetapkan, keputusan yang telah diambil, rencana yang telah disusun, program kerja yang telah dibuat, metode penggerakan yang dipergunakan, pengawasan yang dilakukan dan penilaian yang dilaksanakan, semuanya ditujukan pada segi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya operasional.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional merupakan titik sentral dari seluruh proses administrasi. Tepat

tidaknya rencana yang telah disusun dan disepakati akan terlihat apabila rencana itu dilaksanakan di lapangan.

Di Indonesia, sejak Pelita I, tanggung jawab utama dalam perencanaan di implementasi program-program pembangunan diletakkan di pundak aparatur pemerintah dari pusat sampai ke desa-desa.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan pedesaan di Kecamatan Sinjai Barat, sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka secara singkat dapat dikemukakan beberapa pokok-pokok temuan penelitian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembangunan di lokasi penelitian didasarkan pada rencana pembangunan yang telah dirumuskan.
2. Tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan di lokasi penelitian mempunyai kaitan erat dengan kondisi lingkungan baik fisik maupun sosial dan peranan aparatur pemerintah setempat serta sifat hakiki dari masing-masing program yang akan dilaksanakan.

Selanjutnya, dari kedua pokok temuan tersebut dapat diuraikan, bahwa pelaksanaan pembangunan pedesaan di Kecamatan Sinjai Barat dimulai setelah tahap perencanaan dengan tetap berdasar pada skala prioritas sebagaimana halnya dengan perencanaan yang memprioritaskan empat jenis prasarana desa seperti yang telah dikemukakan yakni, prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran, dan prasarana sosial. Pelaksanaan pembangunan keempat prasarana tersebut dilakukan secara serentak dengan tetap memperhatikan skala

prioritas, dalam pengertian bahwa pelaksanaan tetap didasarkan pada kebutuhan yang dirasa mendesak pada masing-masing desa.

Sehubungan dengan itu, maka dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan di Kecamatan Sinjai Barat telah diupayakan suatu tata cara yang lebih terpadu, baik ditinjau secara vertikal maupun horizontal yang dilakukan sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaan rencana itu sendiri.

Dari tiga desa yang terkena sampel, telah melaksanakan keterpaduan pembangunan, yaitu sasaran yang hendak dicapai yakni terwujudnya desa swasembada dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera lahir dan bathin. Di samping itu pembangunan desa yang dilakukan oleh BPD di Kecamatan Sinjai Barat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat.
2. Dinamis dan berkelanjutan
3. Menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.

Selain hal-hal tersebut, maka pola pelaksanaan pembangunan pedesaan yang dilakukan oleh BPD di Kecamatan Sinjai Barat mempunyai identitas tersendiri antara lain :

1. Menyeluruh dan meliputi berbagai aspek.
2. Perpaduan sasaran sektoral dan regional dengan kebutuhan yang mendasar pada masyarakat.
3. Meratakan dan menyebarkan pembangunan ke seluruh desa yang ada di wilayah Kecamatan Sinjai Barat.

4. Menggerakkan partisipasi masyarakat, prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat, serta, mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat guna.

Dari pola pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh BPD di Kecamatan Sinjai Barat, yang merupakan proses perpaduan antara dua kelompok utama dalam pembangunan yaitu berbagai kegiatan pemerintah dan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat.

Berbagai kegiatan pemerintah dalam program pembangunan dilakukan oleh berbagai Departemen dan Lembaga-lembaga Non Departemen, baik merupakan program khusus (Inpres) serta program Pemerintah Kabupaten Sinjai adalah merupakan kelompok kegiatan pemerintah, dimana inisiatif perencanaan dan pembiayaan bersumber dari atas menurut bidang dan tanggung jawab masing-masing.

Sedangkan kegiatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh warga masyarakat dan anggota BPD di Kecamatan Sinjai Barat merupakan kesadaran yang tumbuh dari bawah sebagai tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan. Ini sesuai dengan hakikat pembangunan desa yang pada prinsipnya merupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri.

Untuk lebih memperjelas pelaksanaan pembangunan yang didasarkan pada rencana yang telah disusun, maka berikut ini akan diuraikan aspek-aspek pelaksanaannya.

1. Pembangunan Prasarana Perhubungan

Penduduk di Kabupaten Sinjai umumnya dan di Kecamatan Sinjai Barat khususnya, mempunyai tempat pemukiman yang terpisah-pisah, ada yang bermukim pada lokasi perkampungan di pedalaman/dataran, ada pula yang bermukim pada lokasi perkampungan di pegunungan. Oleh karena terpisah-pisahanya tempat pemukiman mereka, maka diperlukan prasarana perhubungan yang diharapkan dapat memperlancar arus kegiatan masyarakat.

Dari wawancara penulis dengan anggota BPD diungkapkan bahwa berdasarkan permasalahan yang dihadapi di Kecamatan Sinjai Barat, khususnya di bidang perhubungan, maka langkah-langkah yang ditempuh oleh BPD diarahkan pada kegiatan :

- a. Rehabilitasi jalan-jalan desa dan jembatan serta duiker.
- b. Pengadaan prasarana lokal guna memperlancar hubungan antara desa dengan desa lainnya.

Dengan adanya peningkatan atau pembuatan prasarana perhubungan tersebut telah banyak membantu kegiatan masyarakat di Kecamatan Sinjai Barat.

2. Pembangunan Prasarana Produksi

Adapun mengenai pembangunan prasarana produksi dilakukan untuk membantu pertumbuhan dan peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan, khususnya dalam hal peningkatan prasarana produksi pertanian sebagai

konsekuensi logis dari kehidupan masyarakat di Kecamatan Sinjai Barat yang mayoritas bermata pencaharian petani. Upaya peningkatan pembangunan prasarana produksi juga dimaksudkan untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan di bidang prasarana produksi, maka pemerintah bersama BPD di Kecamatan Sinjai Barat telah menempuh kebijaksanaan antara lain :

- Mengadakan perluasan perwilayahan komoditas dengan jalan menyediakan lahan di beberapa desa.
- Mengadakan penanggulangan lahan kritis melalui Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam (UPSA).

3. Pembangunan Prasarana Pemasaran

Erat kaitannya dengan pembangunan prasarana produksi, maka pemerintah bersama BPD juga memperhatikan pembangunan fasilitas-fasilitas pemasaran hasil produksi masyarakat yang dimaksudkan :

- a. Membantu menciptakan iklim berusaha yang lebih baik bagi pengusaha kecil

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka di Kecamatan Sinjai Barat telah terdapat 3 buah pasar yang keberadaannya sangat membantu para pedagang-pedagang eceran, meskipun demikian masyarakat masih merasa perlu prasarana pemasaran di beberapa desa

b. Dengan adanya pasar yang menjadi tempat menjual bagi pedagang eceran ataupun pedagang bakulan, maka secara tidak langsung masyarakat telah memberikan partisipasinya terhadap pembangunan melalui pembayaran retribusi pasar yang dipungut oleh pemerintah.

4. Pembangunan Prasarana Sosial

Khusus dalam hal pembangunan prasarana sosial yang telah dikerjakan oleh BPD di Kecamatan Sinjai Barat, nampak pada adanya upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat karena tersedianya Puskesmas di Ibukota Kecamatan Sinjai Barat serta beberapa Puskesmas Pembantu (Pustu) di berbagai desa, disamping terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai koordinasi yang baik antara pemerintah dan petugas keamanan dan yang lebih penting karena adanya keterlibatan masyarakat secara keseluruhan.

Kemudian dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pemerintah bersama BPD senantiasa mendorong upaya pembangunan di bidang pendidikan.

Dari uraian di atas, maka nampak dengan jelas bahwa pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sinjai Barat tidak terlepas dari keempat jenis prasarana, dan sudah tentu harus melibatkan banyak instansi dalam pelaksanaannya, dalam hubungan inilah perlu ditekankan kembali akan betapa pentingnya para pelaksana kegiatan operasional terlibat dalam penjabaran rencana menjadi program kerja karena keterlibatan itu akan mempunyai arti

psikologis yang sangat penting dalam menyukseskan keberhasilan kegiatan operasional

Tabel 9

Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Pembangunan
Pedesaan di Kecamatan Sinjai Barat

Responden	Pelaksanaan Pembangunan				Jumlah	
	Sesuai Dengan Rencana		Tidak Sesuai Dengan Rencana		F	%
	F	%	F	%		
1. Aparat Kecamatan dan Aparat Desa	40	100	-	-	40	100
2. Pengurus/Anggota BPD	30	100	-	-	30	100
3. Anggota Masyarakat	25	83	5	17	30	100
Jumlah	95		5		100	100

Sumber Data : Hasil Penelitian di Tiga Desa Tahun 2002

Deskripsi data pada tabel 9 menunjukkan, bahwa 95 orang atau 95 persen responden yang dijadikan sampel dari tiga desa menyatakan, bahwa pelaksanaan pembangunan desa sudah sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, sementara 5 orang atau 17 persen responden yang menyatakan, bahwa pelaksanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana.

Keberhasilan pembangunan di Kecamatan Sinjai Barat sangat ditentukan oleh peranan aparatur pemerintah, kondisi lingkungan fisik maupun sosial serta sifat hakiki masing-masing program. Dari uraian tentang pelaksanaan pembangunan keempat prasarana desa DI kecamatan Sinjai Barat terbukti bahwa

tingkat keberhasilan pembangunan mempunyai kaitan erat dengan kondisi lingkungan fisik, seperti keadaan tanah, pengairan, cuaca, sarana perhubungan maupun lingkungan sosial seperti : sikap masyarakat, tradisi, kepercayaan-kepercayaan yang dijunjungi tinggi oleh masyarakat setempat. Kemudian yang lebih penting adalah pola kepemimpinan yang ditampilkan oleh Kepala Desa yaitu menampilkan pola kepemimpinan **ajjoreng** (panutan) dengan menampilkan sifat-sifat utama yang dinilai tinggi dalam lingkungan masyarakat desa, secara relatif berhasil membangkitkan partisipasi masyarakat.

C. Pengawasan Pembangunan Pedesaan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sinjai Barat secara efektif dan efisien, maka diadakan kegiatan pengawasan yang lebih bersifat mengusahakan agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama.

Sehubungan dengan itu, maka pengawasan pembangunan pedesaan di Kecamatan Sinjai Barat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif yang dilakukan pada tahap pengusulan rencana oleh BPD kepada Kepala Desa . Jadi dalam hal ini, pengawasan menjadi hak Kepala Desa bersangkutan untuk memberikan pengesahan terhadap usul rencana dari BPD sebagai pihak yang diawasi. Selanjutnya Kepala Desa bersangkutan mendapat pengawasan dari pihak atasan langsung, yang dalam

hal ini adalah Camat. Jadi setelah Kepala Desa bersangkutan mengesahkan rencana yang diusulkan oleh BPD, maka Kepala Desa bersangkutan kemudian melanjutkan usul tersebut kepada Camat untuk memperoleh pengesahan, dalam hal inilah Camat melakukan fungsi pengawasannya yang bersifat preventif.

Dalam menjalankan pengawasan pada tahap ini, maka pengawas mengamati dan menyeleksi setiap usul yang diajukan atau dimintakan pengesahan, apabila pengawas beranggapan bahwa usul yang diajukan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya atau dianggap bertentangan dengan kepentingan umum, maka pengawas dapat menolak untuk memberikan pengesahan. Oleh karena adanya penolakan dari pihak pengawas, maka usul rencana tersebut tidak dapat direalisasikan atau dilanjutkan ke tingkat yang lebih atas. Penolakan tersebut biasanya disampaikan dalam diskusi UDKP atau temu karya BPD.

2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif berwujud penundaan/penangguhan dan pembatalan oleh pihak pengawas terhadap keputusan yang telah berjalan. Adapun lama penundaan tidak boleh lebih dari 6 bulan. Meskipun demikian di Kecamatan Sinjai Barat sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari kepala Wilayah Kecamatan dan Kepala Desa yang terkena sampel menjelaskan, bahwa sampai sekarang ini belum pernah diadakan penundaan kegiatan pembangunan sebagai akibat dari adanya penyimpangan terhadap keputusan-keputusan yang

telah disepakati ataupun karena bertentangan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu pihak pengawas pembangunan di Kecamatan Sinjai Barat selalu memperketat pengawasannya di bidang perencanaan, dengan kata lain pengawas preventif lebih diutamakan.

Disamping kedua jenis pengawasan tersebut, maka pengawasan pembangunan di Kecamatan Sinjai Barat juga terselenggara karena berjalannya tertib dan wibawa hukum, sehingga dalam hal pengawasan fungsi koordinasi semakin memegang peranan penting, khususnya pada tahap perumusan rencana. Dari hasil wawancara penulis dengan Kapolsek maupun dengan Dan-Ramil Kecamatan Sinjai Barat diperoleh keterangan bahwa koordinasi antara pihak pemerintah dan pihak keamanan berjalan dengan baik, bahkan dalam setiap pelaksanaan diskusi UDKP di Kecamatan Sinjai Barat Kapolsek dan Dan-Ramil selalu didudukkan sebagai nara sumber, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh unsur penegak hukum tersebut senantiasa berjalan dengan baik karena keterlibatannya dalam proses perumusan rencana yang hendak direalisasikan.

Kemudian khusus di tingkat desa, pemerintah berupaya melibatkan masyarakat untuk senantiasa mengawasi jalannya pembangunan, seperti Desa Tassilulu, Bontosalama, dan Turungan Baji yang menjadi sampel penelitian menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan yakni dengan jalan menyalurkan pendapat mereka kepada pengurus BPD tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di desanya. Terlebih lagi jika dana pembangunan yang digunakan bersumber dari masyarakat itu sendiri, maka

pengawasan yang dilakukan tergolong tinggi, namun jika dananya dari pemerintah maka tingkat pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan tergolong rendah. Ini disebabkan oleh karena kurangnya informasi yang sampai di masyarakat. Seperti dalam hal pembangunan uang subsidi desa, nampaknya masih relatif banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya.

Untuk lebih memperjelas pelaksanaan kegiatan pengawasan pembangunan pedesaan di Kecamatan Sinjai Barat, maka dikemukakan hasil penilaian 100 orang responden yang disajikan pada tabel 10 sebagai berikut :

Tabel 10

Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Pengawasan
Pembangunan Pedesaan Di Wilayah Kecamatan Sinjai Barat

Responden Jawaban Responden	I		II		III		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%
1. Sangat Aktif	10	25	5	16,67	10	33,33	25	25
2. Aktif	30	75	20	66,66	12	60	62	62
3. Kurang Aktif	-	-	5	16,67	8	26,67	13	13
4. Tidak Aktif	-	-	-	-	-	-	-	-
T o t a l	40	100	30	100	30	100	100	100

Sumber : Hasil Penelitian di Tiga Desa tahun 2002

Keterangan : I. Aparat Camat/Aparat Desa
II. Pengurus Anggota BPD
III. Anggota Masyarakat

Deskripsi data pada tabel 8 menunjukkan, bahwa 62 orang atau 62 persen responden yang dijadikan sampel dari tiga desa berpendapat bahwa pengawasan pembangunan di Kecamatan Sinjai Barat berjalan "aktif", dan 25 orang atau 25 persen responden yang berpendapat bahwa pengawasan pembangunan pedesaan di

Kecamatan Sinjai Barat berjalan dengan “sangat Aktif”, serta 13 orang atau 13 persen responden yang menyatakan berjalan “kurang aktif”.

Berdasarkan persentase data pada tabel 10 di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengawasan pembangunan pedesaan yang dilakukan oleh pemerintah dan pengurus/anggota BPD serta anggota masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinjai Barat berjalan dengan aktif, meskipun masih terdapat banyak kelemahan dalam hal pengawasan pembangunan pedesaan, namun keaktifan aparat pemerintah dan masyarakat dalam mengawasi jalannya pembangunan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan pedesaan, karena dengan keaktifan aparat pemerintah dalam kegiatan pengawasan akan memperkecil kemungkinan pembiasaan pembangunan.

D. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa partisipasi masyarakat yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah keterlibatan masyarakat dalam menikmati hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan itu sendiri, misalnya ; dengan pembangunan diharapkan terjadi perluasan kesempatan kerja, dan adanya kesempatan itu, kesediaan dan kemampuan bekerja anggota masyarakat didalamnya adalah bentuk partisipasi yang paling dasar.

Sehubungan dengan itu, maka sangat tepat jika pembangunan pedesaan diarahkan pada perluasan partisipasi melalui kebijaksanaan yang menekankan

pentingnya pembangunan prasarana desa dalam rangka menopang kemajuan pembangunan di bidang yang lain, karena dengan pembangunan di bidang prasarana desa senantiasa menyentuh kepentingan segenap lapisan masyarakat, bahkan dapat menjadi penopang kelancaran kegiatan perekonomian masyarakat pedesaan.

Demikian halnya dengan pelaksanaan pembangunan pedesaan di Kecamatan Sinjai Barat yang memprioritaskan pembangunan prasarana desa, nampaknya banyak mendapat dukungan dari masyarakat karena hasil-hasilnya banyak memberikan arti terhadap kegiatan masyarakat pedesaan khususnya, seperti dengan peningkatan prasarana jalan, pembangunan duiker, jembatan yang menghubungkan antara desa dengan desa yang dibatasi oleh sungai.

Sekalipun pembangunan yang dilaksanakan sejak Pelita I sampai sekarang ini bersifat menyeluruh di berbagai bidang (termasuk bidang sosial, politik, agama, dan kebudayaan), namun harus diakui bahwa pembangunan bidang ekonomi merupakan prioritas utama. Hanya saja karena penduduk Kecamatan Sinjai Barat sebagian besar mendapat sumber penghidupan dari sektor pertanian, maka titik berat pembangunan diletakkan pada sektor pertanian. Oleh karena itu partisipasi masyarakat pedesaan lebih menonjol pada sektor pembangunan pertanian karena masyarakat telah banyak memperoleh manfaat dari pembangunan sektor pertanian.

Tonggak sukses pembangunan sektor pertanian diawali oleh pengenalan demonstrasi massal (demas), bimbingan massal (bimas) yang terus menerus

disempurnakan sampai sekarang ini. Dan melalui program penyuluhan pertanian ini kepada petani diperkenalkan berbagai teknologi baru yang dihasilkan dari penelitian yang mendalam. Teknologi tersebut meliputi teknologi biologis (berupa bibit unggul), teknologi biokimia (berupa insektisida dan pestisida) dan teknologi mekanis (seperti pemakaian lahan pertanian).

Masyarakat menerima teknologi baru itu terutama karena penerapannya diperkirakan akan meningkatkan pendapatan mereka. Ini merupakan salah satu contoh yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menikmati hasil-hasil pembangunan cukup tinggi apabila diperkirakan akan hasil usaha mereka, dalam pengertian bahwa partisipasi masyarakat pedesaan berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi. Berbagai program pemerintah diterima oleh masyarakat pedesaan berdasarkan pertimbangan ekonomis, yaitu apakah dengan mengikuti program tersebut pendapatan mereka akan meningkat atau tidak.

Penyampaian program pemerintah kepada masyarakat pedesaan biasanya didasarkan atas logika, antara lain artian bahwa masyarakat pedesaan diberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai baik buruknya penerapan program tersebut. Adanya kewajiban belajar di tingkat sekolah dasar, dan mungkin juga pada masa mendatang di tingkat sekolah menengah pertama, sangat membantu masyarakat pedesaan untuk berpikir secara logis. Perkembangan merupakan petunjuk bahwa masyarakat diajak secara sadar untuk berpikir dan berbuat berdasarkan logika (nilai teori) dan tidak hanya berdasar atas kepercayaan akan baik buruknya atau benar salahnya suatu tindakan. Perkembangan ini diperkuat oleh berbagai

program masuk desa lainnya, seperti program mahasiswa KKN dan ABRI Masuk Desa (AMD).

Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa nilai teori yang berkembang di masyarakat telah meningkat selama masa pembangunan sejak Pelita I. Sementara itu, tindakan-tindakan yang berdasarkan atas tradisi atau semata-mata kepercayaan tanpa logika, telah semakin berkurang.

Berbarengan dengan peresapan berbagai teknologi pedesaan, pemerintah juga mengenakan program pembangunan desa melalui bantuan desa. Pada program ini tidak dibenarkan lagi bahwa proyek-proyek di desa dilaksanakan secara gotong royong oleh masyarakat desa tanpa imbalan berupa upah. Hal inilah yang nampaknya mempengaruhi partisipasi masyarakat, misalnya partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota koperasi tampaknya sangat tergantung pada keuntungan finansial yang ditawarkan oleh koperasi. Keuntungan finansial itu mungkin berupa :

1. Anggota koperasi dapat membeli barang /jasa dengan harga yang lebih rendah dibandingkan membeli di tempat lain.
2. Anggota koperasi dapat menjual hasil produksinya di koperasi dengan harga yang lebih mahal dibandingkan kalau dijual di tempat lain.
3. Kalaupun harga pada kedua hal di atas sama dengan harga di tempat lain, anggota koperasi memperoleh kredit pembeli atau kredit penjual dengan syarat yang lebih baik dibandingkan dengan kredit sejenis yang diberikan oleh pihak swasta.

4. Anggota koperasi mendapat pembagian sisa hasil usaha karena berpartisipasi dalam koperasi.
5. Keuntungan finansial lainnya yang menyebabkan kehadiran koperasi sangat dirasakan oleh masyarakat dan di anggap oleh masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa kurangnya kemampuan koperasi menawarkan keuntungan finansial kepada masyarakat kiranya dapat menjelaskan mengapa tingkat partisipasi masyarakat dalam koperasi sangat rendah sampai dewasa ini. Dan sekaligus menjelaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat telah terjadi peningkatan nilai budaya berupa nilai teori dan nilai ekonomi, sehingga upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat perlu didasarkan pada nilai budaya masyarakat itu sendiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa proses perumusan perencanaan pembangunan pedesaan dilakukan melalui musyawarah oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (BKMD), dan kemudian hasilnya diteruskan ke Kecamatan untuk didiskusikan dalam Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP). Selanjutnya hasil dari diskusi UDKP diteruskan ke tingkat Kabupaten untuk dikelola oleh Bappeda bersama-sama Kepala Kantor Pembangunan Desa serta instansi yang ada dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat II (Rakorbang Tingkat II). Dan hasilnya kemudian diajukan ke Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk dikelola sebagaimana halnya di Daerah Tingkat II, kemudian hasilnya diteruskan oleh Gubernur Kepala Daerah kepada Bappenas dan Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah untuk mendapat pengesahan, sekaligus penentuan dananya yang menjadi bahan dalam APBN untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Dan khusus untuk proyek pembangunan yang pembiayaannya bersumber dari swadaya masyarakat maka prosesnya hanya sampai pada tingkat Kabupaten. Jadi setelah proyek disahkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah, maka rencana tersebut dapat dilaksanakan oleh desa bersangkutan.

Permasalahannya, meskipun proses perumusan perencanaan pembangunan pedesaan telah dilakukan oleh setiap BPD dari masing-masing desa, namun pada dasarnya perencanaan pembangunan pedesaan lebih didominasi dengan *top down planning*, hal mana disebabkan kurangnya tenaga terampil di bidang perencanaan pada tingkat desa di samping minimnya wawasan perencanaan yang dimiliki oleh pengurus dan anggota BPD itu sendiri.

2. Bahwa pelaksanaan pembangunan pedesaan dimulai setelah tahap perencanaan selesai dan dilaksanakan berdasarkan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Dan mengenai pola pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh BPD merupakan proses perpaduan antara dua kelompok utama dalam pembangunan yaitu berbagai leg pemerintah dan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat. Namun dalam hal pelaksanaannya masih diperhadapkan pada kendala berupa keterpaduan kebutuhan dengan kehendak sasaran dan tujuan yang diharapkan dari atas.
3. Pengawasan pembangunan pedesaan dilakukan secara terpadu oleh pemerintah dan seluruh masyarakat melalui wakil-wakilnya yang ada dalam lembaga desa. Adapun kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih ditekankan pada upaya penyesuaian pelaksanaan dengan aturan yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaannya pengawasan pembangunan pedesaan yang dilakukan masih lemah hal mana disebabkan oleh sikap mental yang kurang tegas di samping orang-orang yang bertugas melakukan pengawasan masih banyak yang tidak mengerti tugasnya.

4. Evaluasi pembangunan dilakukan pada tahap akhir kegiatan, karena informasi final tentang berbagai sasaran penilaian hanya mungkin diperoleh apabila kegiatan-kegiatan itu telah selesai dikerjakan. Namun dalam hal ini nampaknya masih memerlukan dukungan informasi yang lebih efektif.
5. Hasil-hasil pembangunan pedesaan nampaknya masih menunjukkan adanya kesenjangan antara kehendak kegiatan program yang dituangkan dari tingkat atas melalui instansi vertikal dengan kebutuhan di daerah. Ini terjadi karena fungsi koordinasi perencanaan *bottom up* dan *top down* belum dapat dipertemukan secara rasional, di samping belum sesuai alokasi dana dengan tuntutan kebutuhan desa yang relatif masih terkebelakang.
6. Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh manajemen pembangunan. Namun dalam hal ini nampaknya belum sepenuhnya mendapat perhatian dari sebagian administrator pembangunan khususnya di tingkat desa.

B. Saran-saran

1. Perlu kiranya pengadaan program-program latihan yang mengarah kepada upaya peningkatan kemampuan perencanaan pembangunan pedesaan sebagaimana salah satu langkah untuk memperoleh tenaga terampil di bidang perencanaan.
2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai kiranya dapat lebih mengupayakan pendekatan keterpaduan koordinasi yang lebih rasional untuk

mempertemukan aspirasi masyarakat dengan alokasi kegiatan secara proporsional dengan melakukan analisis perencanaan program.

3. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai kiranya dapat mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan untuk lebih memadukan keseluruhan pelaksanaan fungsi-fungsi pengawasan sehingga pada gilirannya akan tercipta sikap mental yang tegas dari para pengawas serta perlunya ada langkah-langkah yang mengarah kepada upaya peningkatan kemampuan tenaga pengawas.
4. Disarankan kepada Pemerintah Wilayah Kecamatan Sinjai Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai agar dapat mengantisipasi pengadaan serta peningkatan kemampuan aparat melalui pendidikan dan latihan tatalaksana pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sehingga dapat tercipta efektivitas informasi kebutuhan pembangunan.
5. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai serta instansi vertikal dan jawatan otonom agar dapat lebih meningkatkan koordinasi keterpaduan program berdasarkan spesifikasi kebutuhan pembangunan desa.
6. Disarankan kepada seluruh administrator pembangunan di tingkat desa agar senantiasa memperhatikan manajemen pembangunan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Bintoro Tjokroamidjojo; 1981; **Pengantar Administrasi Pembangunan** ; Jakarta, LP3ES.

-----; 1987; **Manajemen Pembangunan**; Jakarta, Haji Masagung.

-----; dan Mustaopodijoyo A.R; a983; **Teori dan Strategi Pembangunan Nasional**; Jakarta, Gunung Agung.

Coralie Bryant dan Louise G. White; 1987; **Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang**; Jakarta, LP3ES.

Ndraha Talizidulu; 1983; **Metodologi Pemerintahan Indonesia**; Jakarta, Bina Aksara.

-----; 1990; **Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas**; Jakarta, Reneka Cipta.

Koentaraningrat; 1995; **Metodologi Penelitian Masyarakat**; Jakarta, Gramedia.

Sarwoto; 1983; **Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen**; Jakarta, Ghalia Indonesia.

Syarifuddin Ateng; 1993; **Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah**; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Siagian S.P; 1977; **Filsafat Administrasi**; Jakarta, Gunung Agung.

----- 1974; **Administrasi Pembangunan**; Jakarta, Gunung Agung.

----- 1985; **Analisis Serta Perumusan Kebijakanaksanaan dan Strategi Organisasi**; Jakarta, Gunung Agung.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi; 1986; **Metode Penelitian Survey**; Jakarta, LP3ES.

Sutarto; 1993; **Dasar-Dasar Organisasi**; Gajah Mada University, Yogyakarta.

Taliziduhu Ndraha; 1993; **Metodologi Pemerintahan Indonesia**; Jakarta, Bina Aksara.

The Liang Gie; 1982; **Himpunan Pembahasan Terhadap Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah di Indonesia**; Yogyakarta, Super Sukses.

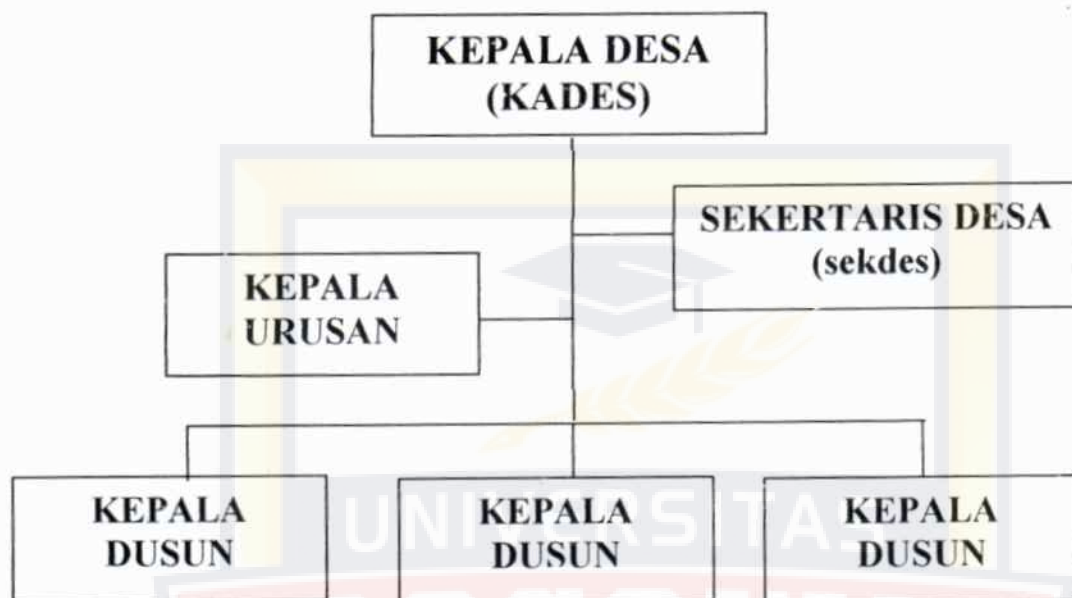
B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945; Departemen Penerangan, Jakarta

Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara; Departemen Penerangan, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah; Departemen Penerangan, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah; Departemen Penerangan, Jakarta





PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jln. Urip Sumohardjo No. 269 Telp. 436 936 - 436 937
MAKASSAR

Makassar, 12 September 2002

Kepada

Nomor : 070.5.1/1033/Balitbangda
Lampiran : -
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Yth. Bupati Sinjai

Di -
Sinjai

Berdasarkan surat Dekan FISIPOL Universitas 45 Nomor: A.005/FSP/U-45/UN/2002 Tanggal 9 September 2002 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : A.Saiful Alam
Nomor Pokok : 4598021057
Prog. Studi : Ilmu Adm./Ilmu Adm.Negara
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kampus universitas 45

Bermaksud melakukan penelitian di daerah/kantor saudara, dengan judul:

"MANAJEMEN PEMBAGUNAN PEDESAAN DI KECLMATAN SINJAI BARAT KAB.SINJAI"

dari bulan *September s/d November 2002*

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Bappeda, apabila kegiatan dilaksanakan di Kabupaten / Kota.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) eksemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulsel.Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan di atas.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

an. KEPALA BALITBANGDA PROP. SULSEL.
Sekretaris,



Drs. ABDUL HAFID WERO
Pangkat : Pembina
NIP : 130 538 542

TEMBUSAN : Kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan);
2. Dekan FISIPOL Universitas 45;
3. Kepala Badan Koordinasi Wilayah I dan II (sesuai lokasi penelitian);
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH

Jalan Bulu-Bulu Barat No.1 ☎ (0482) 21131 Fax: (0482) 21505 Sinjai 92611

Sinjai, 16 September 2002

Nomor : 070 /079/ P -- Tian / Bappeda
Lampiran : ----
Perihal : **Izin Penelitian**

K e p a d a,
Yth. Camat Sinjai Barat.

di.-

Sinjai.

Berdasarkan Surat Kepala Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 070.5.1/1033/Balitbangda, tanggal 12 September 2002 perihal ***Izin / Rekomendasi Penelitian***, maka bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa :

N a m a : **A. SAIFUL ALAM**
Nomor Pokok : 4598021057
Program Studi : Ilmu Adm. / Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kampus Universitas 45 Makassar

Bermaksud mengadakan penelitian, survey, pengambilan data dan wawancara di daerah Bapak dengan judul :

" MANAJEMEN PEMBANGUNAN PEDESAAN DI KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI "

(dari bulan September s.d November 2002)

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan ;

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Kabupaten Sinjai Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Sinjai.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Menaati semua peraturan perundang - undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) exemplar Copy hasil penelitiannya kepada Bupati Kabupaten Sinjai / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Sinjai.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas

Demikian disampaikan Kepada Saudara untuk dimaklumi dan seperlunya.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KAB. SINJAI,


MUKHLIS ISMA, S.E, M.Si.

Pangkat : Pembina
NIP : 580 017 528

Tembusan :

1. Kepala Balitbangda Prop. Sul-Sel di Makassar;
2. Dekan FISIPOL Universitas 45 Makassar di Makassar;
3. Bupati Sinjai di Sinjai (sebagai laporan);
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Pertinggal.

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
CAMAT SINJAI BARAT

Jl. Persatuan Raya No. A. 69 KP. 92653 Manipi

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. 070 / SBR. 565 / 2002

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kecamatan Sinjai Barat, Menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : A. Saiful Alan
No. Stambuk : 4598021057
Jurusan/Program Study : Ilmu Administrasi / Administrasi Negara
Alamat : BTN Antang Jaya Blok Y. No. 10 Makassar
Jenjang Program : Strata Satu (S1)

Telah mengadakan penelitian di Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai dari bulan September s/d Nopember 2002 dalam rangka penyusunan / penulisan skripsi dengan judul : " MANAJEMEN PEMBANGUNAN PEDESAAN DI KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Manipi, 30 Nopember 2002
Camat
CAMAT
SINJAI BARAT
Drs. H. ANDI TALHA
NIP. 010 177 648